



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

**DINAS
KESEHATAN**
Kabupaten Sukoharjo

*"Terwujudnya Derajat Kesehatan
Masyarakat yang Meningkat"*

**Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo**

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo

Telp. (0271) 593015 Fax. (0271) 592251

website: dkk.sukoharjokab.go.id, email: dkk@sukoharjokab.go.id



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 43 TAHUN 2021

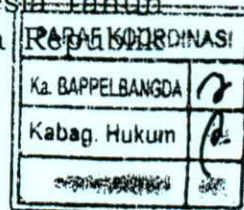
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026

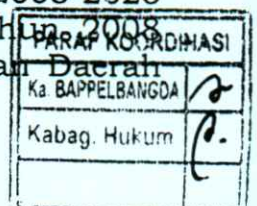
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

PARAF KOORDINASI	
Ka BAPPELBANGDA	
Kabag. Hukum	

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026.

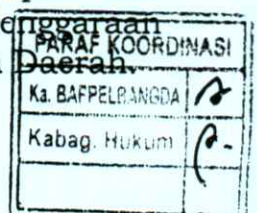
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif serta diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. Bab VIII : Penutup

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD.

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPELBANGDA	
Kabag. Hukum	

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB IV

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - u. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - w. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
Kl. BAPPELBAKDA	/
Kabag. Hukum	/
	/

- x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. Kecamatan Weru;
 - cc. Kecamatan Bulu;
 - dd. Kecamatan Tawang Sari;
 - ee. Kecamatan Sukoharjo;
 - ff. Kecamatan Nguter;
 - gg. Kecamatan Bendosari;
 - hh. Kecamatan Polokarto;
 - ii. Kecamatan Mojolaban;
 - jj. Kecamatan Grogol;
 - kk. Kecamatan Baki;
 - ll. Kecamatan Gatak; dan
 - mm. Kecamatan Kartasura.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
Ka BAPPELBANGDA	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 September 2021

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI *P*

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Widodo

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 44

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPELBANGDA	<i>P</i>
Kabag. Hukum	<i>P</i>
	<i>P</i>



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS KESEHATAN

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514 Telp. (0271) 593015

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : dr. YUNIA WAHDIYATI

NIP : 19750607 200604 2 020

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Berdasar Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/204/2019 tanggal 27 Agustus 2019. Bertugas untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan dr. Muwardi Nomor 66 Sukoharjo.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, Agustus 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO



dr. YUNIA WAHDIYATI

Pembina TK. I

NIP. 197506072006042020

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO	12
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
	2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	15
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.....	30
	2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan	51
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	60
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
	3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	64
	3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan	67
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD	69
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	71
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	74
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	74
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	78
5.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	78
5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	78
5.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman.....	79
5.4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	79
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	157
BAB VIII	PENUTUP.....	162

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2020 – 2024.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo saat ini telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2026. misi pembangunan daerah yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
- 3) Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi.
- 4) Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
- 5) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai penjabaran pembentukan Penjabaran RPJMD, maka seluruh Perangkat daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo. Renstra Dinas Kesehatan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo disusun sebagai upaya dalam

mendukung pencapaian visi misi Pembangunan Daerah terutama pada misi ke-2 yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**. Penyusunan renstra Perangkat daerah juga memperhatikan kebijakan Nasional dalam RPJMN, Renstra Kemenkes, Provinsi dalam RPJMD, Renstra Dinkes. Dengan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan akan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2026 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dengan Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Terdapat beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang Renstra Perangkat khususnya, dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;

19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 -2026 untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pencapaian Visi – Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021– 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan visi, misi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan urusan kesehatan tahun 2021-2026.
- 2) Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk periode 5 tahun yaitu 2021-2026.
- 3) Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- 4) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Memuat informasi tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih aktif berjalan, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan ini.

Bab II ini juga memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan; sumber daya yang dimiliki; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Bagian ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Kesehatan; telaah visi, misi dan program Pembangunan Daerah telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota; telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan KLHS pada RPJMD serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan akan tercapai, sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021-2026 maupun APBN yang dalam penganggarannya melalui mekanisme APBD.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur disesuaikan dengan RPJMD 2021 - 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Dinas Kesehatan juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi:

- 1) Dalam Pasal 2.d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- 2) Dalam pasal 48 ayat 1 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016, menyebutkan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;

- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

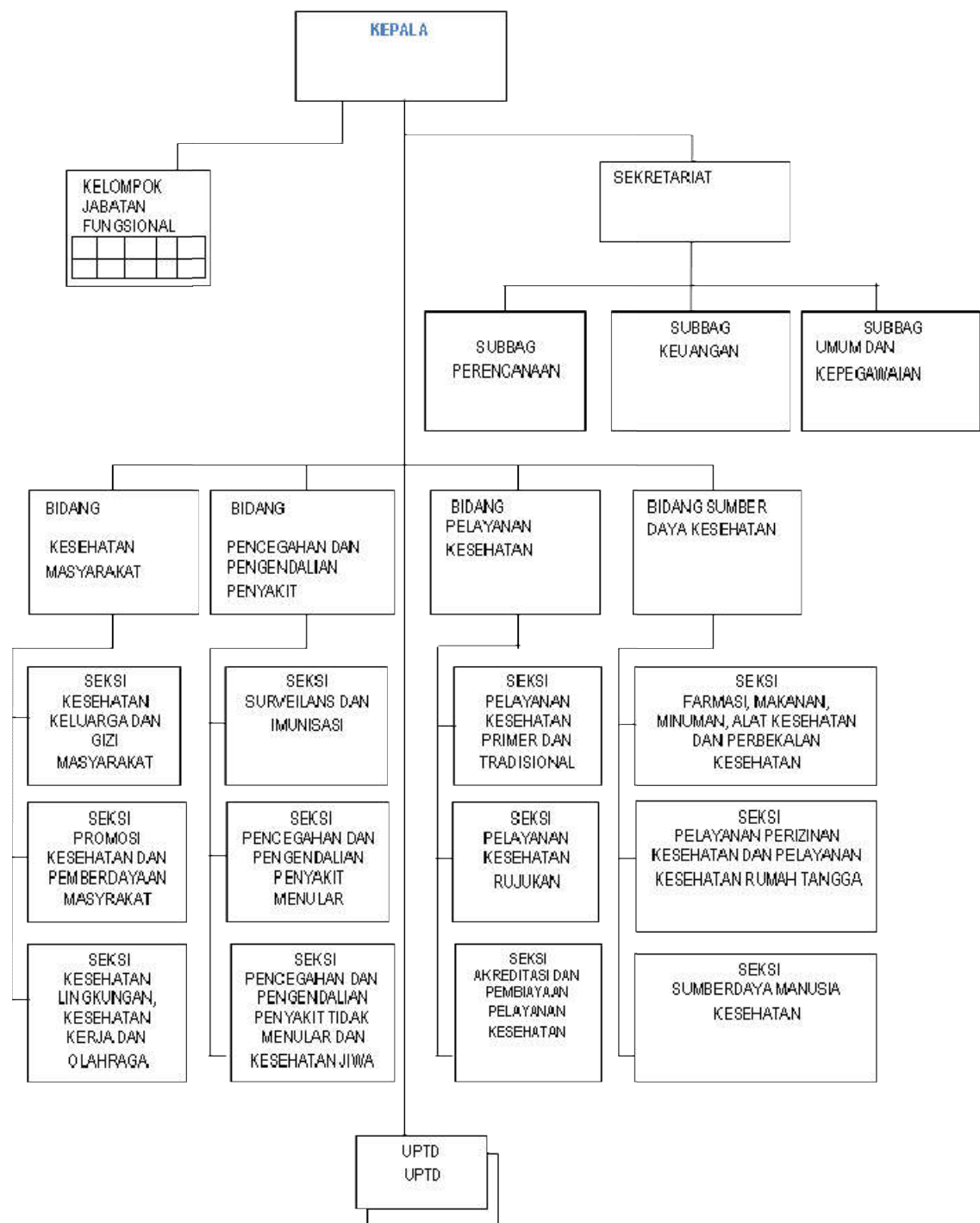
Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:

- 1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- 4. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. Seksi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
- 5. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

- b. Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan.
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:



2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

2.2.1. Ketersediaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo terdiri dari Sekretariat (terdiri dari 3 Sub Bagian), 4 Bidang (masing-masing terdiri dari 3 seksi). Jumlah keseluruhan PNS dan Non PNS di Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah 141 Orang. Terdiri dari 20 Pejabat Struktural (Pejabat Struktural Dinas Kesehatan terdiri dari : 1 orang pejabat eselon II (dua), 5 orang pejabat eselon III (tiga), 14 orang pejabat eselon IV (empat)), 69 orang Dukungan Manajemen, dan 52 orang yang terdiri dari Tenaga Fungsional Kesehatan dan Tenaga Fungsional Umum.

Tabel 2.1. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Medis	1	1	0	0	2
2	Keperawatan	3	1	0	0	4
3	Kebidanan	0	14	0	0	14
4	Kefarmasian	1	7	0	0	8
5	Kesehatan Masyarakat	2	10	0	0	12
6	Kesehatan Lingkungan	1	4	0	0	5
7	Gizi	0	4	0	0	4
8	Keterapian Fisik	1	0	0	0	1
9	Teknik Biomedika	2	0	0	0	2
TOTAL		11	41	0	0	52
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	11	9	0	0	20
2	Dukungan Manajemen	17	10	18	24	69
TOTAL		28	19	18	24	89
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI DINAS KESEHATAN TAHUN 2020						141

1. Ketersediaan SDM Kesehatan Di UPT Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo mempunyai 12 Puskesmas yang terdiri dari 10 puskesmas dengan layanan rawat inap dan 2 puskesmas tanpa pelayanan rawat inap.

Untuk Puskesmas Rawat Inap Perkotaan, Standar Ketenagaan Minimal (SKM) mengacu pada Permenkes No. 43 Tahun 2019, Puskesmas harus memiliki : Dokter/ Dokter Layanan Primer, Dokter gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesmas, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Sedangkan untuk Puskesmas selain Puskesmas Rawat Inap Perkotaan, menggunakan acuan Permenkes No. 43 Tahun 2019, Puskesmas harus memiliki : Dokter/ Dokter Layanan Primer, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Apoteker dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Nutrisisionis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Tenaga Administrasi Keuangan, dan Tenaga Sistem Informasi Kesehatan.

Puskesmas Rawat Inap Perkotaan di Kabupaten Sukoharjo ada 3, yaitu Puskesmas Grogol, Puskesmas Baki, dan Puskesmas Kartasura. Puskesmas Rawat Inap Pedesaan di Kabupaten Sukoharjo ada 7, yaitu Puskesmas Weru, Puskesmas Tawang Sari, Puskesmas Bulu, Puskesmas Nguter, Puskesmas Polokarto, Puskesmas Mojolaban dan Puskesmas Gatak. Puskesmas Non-Rawat Inap Pedesaan di Kabupaten Sukoharjo yaitu Puskesmas Sukoharjo dan Puskesmas Bendosari.

Di Kabupaten Sukoharjo baru ada 1 (satu) Puskesmas yang sudah memenuhi Standart Ketenagaan Minimal (SKM) yaitu Puskesmas Kartasura, sedangkan 11 Puskesmas lainnya belum memenuhi SKM.

Tabel 2.2. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Puskesmas Weru Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	2	4	0	0	6
2	Dokter Gigi	1	1	0	0	2
3	Keperawatan	4	14	1	1	20
4	Kebidanan	0	36	0	2	38
5	Kefarmasian	0	2	0	0	2
6	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	1	0	2
8	Gizi	0	2	0	0	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	1	2
10	Keteknisian Medis	0	2	0	0	2
11	Teknik Biomedika	1	1	0	0	2
TOTAL		8	64	2	4	78
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	1	0	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	5	6	6	11	28
TOTAL		6	6	6	11	39
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS WERU TAHUN 2020						107

Tabel 2.3. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Puskesmas Bulu Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	2	1	0	0	3
2	Dokter Gigi	0	1	0	0	1
3	Keperawatan	2	12	2	2	18
4	Kebidanan	0	22	0	7	29
5	Kefarmasian	0	1	0	0	1
6	Kesehatan Masyarakat	0	2	0	1	3
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	0	0	1
8	Gizi	0	1	0	1	2
9	Keterapian Fisik	1	0	0	1	2
10	Keteknisian Medis	0	2	1	0	3
11	Teknik Biomedika	0	2	0	0	2
TOTAL		5	45	3	12	65
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	2	2	4	1	9
TOTAL		2	3	4	1	10
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS BULU TAHUN 2020						75

Tabel 2.4. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Puskesmas Tawangsari Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	0	3	0	4	7
2	Dokter Gigi	0	1	0	0	1
3	Keperawatan	4	14	0	2	20
4	Kebidanan	0	29	0	3	32
5	Kefarmasian	0	3	0	0	3
6	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	0	1	2
8	Gizi	1	1	0	1	3
9	Keterapian Fisik	0	1	0	0	1
10	Keteknisian Medis	1	1	0	0	2
11	Teknik Biomedika	1	1	0	0	2
12	Nakes Lainnya	0	0	0	1	1
TOTAL		7	55	0	12	74
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	1	0	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	1	1	8	3	13
TOTAL		2	1	8	3	14
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS TAWANGSARI TAHUN 2020						88

Tabel 2.5. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Sukoharjo Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	1	2	4	5	12
2	Dokter Gigi	2	0	0	0	2
3	Keperawatan	2	12	0	1	15
4	Kebidanan	0	31	0	4	35
5	Kefarmasian	0	3	0	0	3
6	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	2	2
7	Kesehatan Lingkungan	1	0	0	0	1
8	Gizi	0	1	0	0	1
9	Keterapian Fisik	0	2	0	0	2
10	Keteknisian Medis	1	2	0	0	3
11	Teknik Biomedika	0	2	0	0	2
TOTAL		7	55	4	12	78
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	0	0	0	0
2	Dukungan Manajemen	6	3	5	4	18
TOTAL		6	3	5	4	18
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2020						96

Tabel 2.6. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Nguter Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	3	3	0	0	6
2	Dokter Gigi	0	1	0	0	1
3	Keperawatan	3	12	0	2	17
4	Kebidanan	0	31	0	4	35
5	Kefarmasian	0	2	0	1	3
6	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	2	2
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	0	0	1
8	Gizi	1	0	0	1	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	0	1
10	Keteknisian Medis	1	2	1	0	4
11	Teknik Biomedika	2	1	0	0	3
TOTAL		10	54	1	10	75
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	1	0	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	3	3	5	5	16
TOTAL		4	3	5	5	17
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS NGUTER TAHUN 2020						92

Tabel 2.7. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Bendosari Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	3	0	0	0	3
2	Dokter Gigi	0	2	0	0	2
3	Keperawatan	5	6	0	2	13
4	Kebidanan	0	31	0	5	36
5	Kefarmasian	0	1	0	0	1
6	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	1	1
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	0	1	2
8	Gizi	0	2	0	0	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	0	1
10	Keteknisian Medis	0	2	0	1	3
11	Teknik Biomedika	1	0	0	0	1
TOTAL		9	46	0	10	65
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	0	0	0	0
2	Dukungan Manajemen	1	2	4	2	9
TOTAL		1	2	4	2	9
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS BENDOSARI TAHUN 2020						74

Tabel 2.8. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Polokarto Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	5	4	0	0	9
2	Dokter Gigi	0	3	0	0	3
3	Keperawatan	5	9	0	2	16
4	Kebidanan	0	31	0	5	36
5	Kefarmasian	1	3	0	0	4
6	Kesehatan Masyarakat	0	1	0	1	2
7	Kesehatan Lingkungan	1	1	0	1	3
8	Gizi	1	1	0	1	3
9	Keterapian Fisik	0	0	0	1	1
10	Keteknisian Medis	1	2	0	1	4
11	Teknik Biomedika	2	1	0	0	3
TOTAL		16	56	0	12	84
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	4	8	6	3	21
TOTAL		4	9	6	3	22
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS POLOKARTO TAHUN 2020						106

Tabel 2.9. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Puskesmas Mojolaban Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	1	4	0	0	5
2	Dokter Gigi	0	1	0	0	1
3	Keperawatan	1	9	0	3	13
4	Kebidanan	0	35	0	2	37
5	Kefarmasian	1	2	0	0	3
6	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	1	1
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	0	1	2
8	Gizi	0	2	0	0	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	0	1
10	Keteknisian Medis	0	2	0	1	3
11	Teknik Biomedika	1	1	0	0	2
12	Nakes Lainnya	0	3	0	0	3
TOTAL		4	61	0	8	73
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	3	4	8	6	21
TOTAL		3	5	8	6	22
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS MOJOLABAN TAHUN 2020						95

Tabel 2.10. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Grogol Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	3	5	0	0	8
2	Dokter Gigi	0	2	0	0	2
3	Keperawatan	1	14	0	4	19
4	Kebidanan	0	37	0	7	44
5	Kefarmasian	0	3	0	0	3
6	Kesehatan Masyarakat	1	0	0	0	1
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	0	1	2
8	Gizi	0	1	0	1	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	1	2
10	Keteknisian Medis	1	2	0	1	4
11	Teknik Biomedika	2	2	0	0	4
TOTAL		8	68	0	15	91
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	3	3	6	4	16
TOTAL		3	4	6	4	17
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS GROGOL TAHUN 2020						108

Tabel 2.11. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Baki Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	2	3	1	2	8
2	Dokter Gigi	0	2	0	0	2
3	Keperawatan	3	9	1	6	19
4	Kebidanan	0	32	0	2	34
5	Kefarmasian	0	3	0	0	3
6	Kesehatan Masyarakat	0	0	1	0	1
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	0	0	1
8	Gizi	0	1	0	1	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	0	1
10	Keteknisian Medis	0	3	0	0	3
11	Teknik Biomedika	0	1	0	0	1
TOTAL		5	56	3	11	75
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	5	8	4	0	17
TOTAL		5	9	4	0	18
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS BAKI TAHUN 2020						93

Tabel 2.12. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Gatak Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	1	7	0	0	8
2	Dokter Gigi	1	2	0	0	3
3	Keperawatan	3	14	0	2	19
4	Kebidanan	0	32	0	3	35
5	Kefarmasian	0	5	1	0	6
6	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0
7	Kesehatan Lingkungan	1	1	0	1	3
8	Gizi	0	1	0	1	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	1	2
10	Keteknisian Medis	1	1	0	0	2
11	Teknik Biomedika	0	2	0	0	2
12	Nakes Lainnya	1	0	0	0	1
TOTAL		8	66	1	8	83
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	1	0	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	5	2	5	5	17
TOTAL		6	2	5	5	18
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS GATAK TAHUN 2020						101

Tabel 2.13. Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Kartasura Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	1	3	0	0	4
2	Dokter Gigi	1	3	0	0	4
3	Keperawatan	4	13	1	5	23
4	Kebidanan	0	30	0	1	31
5	Kefarmasian	0	4	0	1	5
6	Kesehatan Masyarakat	0	1	0	2	3
7	Kesehatan Lingkungan	1	2	0	0	3
8	Gizi	0	2	0	1	3
9	Keterapian Fisik	0	3	0	0	3
10	Keteknisian Medis	0	3	0	1	4
11	Teknik Biomedika	0	2	0	0	2
TOTAL		7	66	1	11	85
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	1	0	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	4	4	7	2	17
TOTAL		5	4	7	2	18
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS KARTASURA TAHUN 2020						103

Adapun Rekapitulasi SDM Kesehatan Puskesmas dan Tenaga Penunjang di Sukoharjo pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Rekapitulasi SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Puskesmas Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	24	39	5	11	79
2	Dokter Gigi	5	19	0	0	24
3	Keperawatan	37	139	5	32	213
4	Kebidanan	0	377	0	45	422
5	Kefarmasian	2	32	1	2	37
6	Kesehatan Masyarakat	1	4	1	10	16
7	Kesehatan Lingkungan	5	12	1	5	23
8	Gizi	3	15	0	8	26
9	Keterapian Fisik	1	14	0	5	20
10	Keteknisian Medis	7	23	2	4	36
11	Teknik Biomedika	10	16	0	0	26
12	Nakes Lainnya	1	3	0	1	5

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
TOTAL		96	693	15	123	927
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	5	4	0	0	9
2	Dukungan Manajemen	37	43	72	50	202
TOTAL		42	47	72	50	211
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS SE- KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020						1.138

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Puskesmas Se-Kabupaten Sukoharjo sebanyak 1.138 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tenaga Medis sebanyak 103 orang, yang terdiri dari Dokter Umum sebanyak 79 orang dan Dokter Gigi sebanyak 24 orang; Keperawatan sebanyak 213 orang; Kebidanan sebanyak 422 orang; Kefarmasian sebanyak 37 orang; Kesehatan Masyarakat sebanyak 16 orang; Kesehatan Lingkungan sebanyak 23 orang; Tenaga Gizi sebanyak 26 orang; Keterapian Fisik sebanyak 20 orang; Keteknisan Medis sebanyak 36 orang; Teknik Biomedika sebanyak 26 orang; Nakes Lainnya sebanyak 5 orang; Struktural sebanyak 9 orang; dan Dukungan Manajemen sebanyak 202 orang.

**2. Ketersediaan SDM Kesehatan UPT
Laboratorium Kesehatan Daerah**

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan penunjang Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan PNS di UPT Labkesda berjumlah 14 Orang yang terdiri dari Dokter Umum 1 orang, Kesehatan Lingkungan 3 orang, Pejabat Struktural 2 orang (yaitu 1 orang Kepala

UPT dan 1 orang Kepala Tata Usaha), Ahli Teknologi Laboratorium Medik 4 orang (Analisis Kesehatan), dan Dukungan Manajemen 4 orang.

**Tabel 2.15. Data Ketersediaan SDM Kesehatan UPT
Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020**

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	0	1	0	0	1
2	Kesehatan Lingkungan	2	1	0	0	3
3	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analisis Kesehatan)	1	3	0	0	4
TOTAL		3	5	0	0	8
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	1	1	0	0	2
2	Dukungan Manajemen	0	0	2	2	4
TOTAL		1	1	2	2	6
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI LABKESDA KAB. SUKOHARJO TAHUN 2020						14

3. Ketersediaan SDM Kesehatan Di Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan kemajuan teknologi. Dan kehidupan social ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit dan tenaga nonkesehatan. Berdasarkan data dari Rumah Sakit yang telah diinput dalam Aplikasi SISDMK, SDM Kesehatan dari 10 rumah sakit di

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.16. Ketersediaan SDM Kesehatan di RSUD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	5	6	6	9	26
2	Dokter Gigi	0	3	0	0	3
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	2	2	0	0	4
4	Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi - Kebidanan (Sp.OG)	1	1	2	0	4
5	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	0	4	0	0	4
6	Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)	2	0	1	0	3
7	Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	1	0	0	1	2
8	Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	1	0	0	0	1
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	0	1	0	0	1
10	Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin (Sp.KK)	0	1	0	1	2
11	Dokter Spesialis Neorologi/Saraf (Sp.S)	2	0	0	0	2
12	Dokter Spesialis Orthopedi & Traumatologi (Sp.OT)	0	0	1	0	1
13	Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan THT Kl (Sp.THT-KL)	2	1	0	0	3
14	Dokter Spesialis Paru - Pulmonologi (Sp.P)	1	1	0	1	3
15	Dokter Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)	2	0	0	0	2
16	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi (Sp.KFR)	0	1	0	0	1
17	Dokter Spesialis Mata (Sp.M)	0	1	1	0	2
18	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (Sp.JP)	1	0	0	0	1
19	Dokter Gigi Spesialis Kawat Gigi - Orthodontis (Sp.Ort)	0	1	0	0	1

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
20	Dokter Gigi Spesialis Anak - Pedodontis (Sp.KGA)	0	1	0	0	1
21	Dokter Gigi Spesialis Gigi Tiruan (Prostodontis) (Sp.Pros)	1	0	0	0	1
22	Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	0	0	1	0	1
23	Dokter Spesialis Urologi (Sp.U)	0	0	1	0	1
24	Keperawatan	54	83	32	79	248
25	Kebidanan	0	30	0	2	32
26	Psikologi Klinis	0	1	0	0	1
27	Apoteker	0	8	0	3	11
28	Tenaga Teknik Kefarmasian	4	13	2	12	31
29	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0
30	Kesehatan Lingkungan	2	2	0	0	4
31	Gizi	0	11	0	0	11
32	Keterapian Fisik	3	5	2	3	13
33	Keteknisian Medis	4	14	4	5	27
34	Teknik Biomedika	4	18	1	12	35
35	Kesehatan Tradisional	0	0	0	0	0
36	Nakes lainnya	0	2	1	0	3
	TOTAL	92	211	55	128	486
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	10	11	0	0	21
2	Dukungan Manajemen	29	21	74	33	157
	TOTAL	39	32	74	33	178
TOTAL SDM KESEHATAN dan TENAGA PENUNJANG RSUD KAB. SUKOHARJO TAHUN 2020		131	243	129	161	664

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi Standar Ketenagaan Minimal SDMK Rumah Sakit Umum Kelas B (Berdasarkan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit → Permenkes 3/2020 (keluar baru, konten gatau, tanya rsud)) untuk jenis SDMK Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter

Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Lain, Tenaga Kefarmasian, Keperawatan, Tenaga Kesehatan lain dan Tenaga Penunjang.

Kekurangan SDM di RSUD Kabupaten Sukoharjo terdapat pada jenis SDM Spesialis Penunjang Medik dan Apoteker. Untuk jenis SDM Spesialis Penunjang Medik, hanya Spesialis Radiologi yang memenuhi standar (2 orang), sedangkan yang lainnya masih terdapat kekurangan SDM, yaitu Spesialis Anestesiologi (1 orang), Spesialis Patologi Klinik (1 orang), Spesialis Patologi Anatomi (1 orang), dan Spesialis Rehabilitasi Medik (1 orang). Untuk jenis SDM Apoteker, terdapat kekurangan sebanyak 2 (dua) orang, karena di standar harusnya ada 13 orang, sedangkan ketersediaan di RSUD hanya 11 orang.

4. Fasilitas Pelayann Kesehatan Di Kabupaten Sukoharjo

Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di wilayah Kabupaten Sukoharjo sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17. Rekapitulasi Fasilitas Peklayanan Kesehatan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

NO.	TIPE FASYANKES	JUMLAH FASYANKES
1	Dinas Kesehatan	1
2	Puskesmas	12
3	Rumah Sakit	10
4	Klinik	98
5	Apotek	205
6	Laboratorium Kesehatan	6
7	Praktik Dokter Umum Perseorangan	992
8	Praktik Dokter Gigi Perseorangan	146
9	Praktek Dokter Spesialis Perorangan	406
10	Praktik Pengobatan Tradisional	143
TOTAL FASYANKES DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020		2.019

Sedangkan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan di tiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.18. Rekapitulasi Fasi sebaran fasilitas pelayanan kesehatan di tiap kecamatan Sukoharjo Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Fasyankes					Total
		RS	Puskes mas	Klinik	Apotek	Lab. Kes	
1.	Weru	0	1	2	9	0	12
2.	Bulu	0	1	1	2	0	4
3.	Tawang Sari	0	1	4	8	0	13
4.	Nguter	0	1	4	6	0	11
5.	Sukoharjo	2	1	9	33	4	49
6.	Bendosari	1	1	8	9	0	19
7.	Polokarto	0	1	5	19	0	25
8.	Mojolaban	0	1	13	14	0	28
9.	Grogol	2	1	16	37	1	57
10.	Baki	0	1	10	17	0	28
11.	Gatak	0	1	3	11	0	15
12.	Kartasura	5	1	23	40	1	70
Total		10	12	98	205	6	331

5. Sumber Daya Modal

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dilengkapi dengan berbagai fasilitas/aset berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.19. Daftar Fasilitas/Aset Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

No	Fasilitas/ aset	Tahun			Satuan
		2018	2019	2020	
1	Tanah	10	10	10	Lokasi
2	Alat-alat besar	144	144	145	Unit
3	Alat-Alat Angkutan	220	220	224	Buah
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	210	210	210	Buah
5	Alat kantor dan rumah tangga	22.574	22.574	24.935	Buah
6	Alat - alat audio dan komunikasi	523	523	536	Unit
7	Alat - alat kedokteran	12.784	12.784	15.805	Buah
8	Alat - alat laboratorium	3.394	3.394	3.417	Buah

No	Fasilitas/ aset	Tahun			Satuan
		2018	2019	2020	
9	Bangunan Gedung	245	245	245	Lokasi
10	Instalasi	7	7	7	Buah
11	Kendaraan Roda 2	171	169	155	Unit
12	Kendaraan Roda 4	49	45	41	Unit
13	Buku dan Perpustakaan	220	220	220	Buah
14	Alat Pertanian (Spayer)			63	Unit

2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

2.3.1. Kinerja Umum

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan berkaitan denganfungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan,penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum,pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan Puskesmas/UPTD, pemantauan, evaluasi danpelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan Kemitraan Dan Gizi, Registrasi Informasi dan Sumber Daya Kesehatan termasuk pelaksanaan Kesekretariatan dinas serta pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.3.2. Kinerja Khusus

Berdasarkan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Capaian pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini.

Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 maupun Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

2.3.3. Capaian Indikator Kinerja

Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran “Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau”, tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.20. Capaian Kinerja “Sasaran terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat”

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Capaian 2019	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Harapan Hidup	tahun	77,56	77,65	100	99,9	100
2	Angka Kematian Ibu	100.000 /KH	102	57,08	144,04	163,78	142,92
3	Angka Kematian Bayi	1.000/ KH	9,2	7,42	119,35	140,33	119,35
Rata-rata Capaian					121,13		120,75

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-3.2, yaitu : Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dari 3 indikator kinerja yang ada, indikator yang pertama yakni

Angka Harapan Hidup terealisasi 77,65 tahun dengan capaian kinerja sebesar 76,98 tertinggi di Jawa Tengah.

Sedangkan untuk 2 (dua) indikator kinerja lainnya, yakni Angka Kematian Ibu masih terjadi 7 kasus atau realisasinya 57,08/100.000 Kelahiran Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tinggi karena dapat menekan dari target sebanyak 102/100.000 KH. Demikian juga untuk indikator angka kematian bayi dapat ditekan dari target sebanyak 9,2/1000 KH menjadi 7,42/1000 KH atau hanya terjadi 91 kasus di tahun 2019 Sehingga secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 121,13% sehingga dapat dikategorikan Sangat Baik.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka capaian kinerja 2020 ini cenderung mengalami sedikit penurunan namun masih dibawah target. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.21. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2020 “Sasaran terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat”

No.	Indikator	Satuan	2019		Tahun 2020		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Harapan Hidup	tahun	77,49	99,90	77.56	77,65	100,00
2	Angka Kematian Ibu	10.000/ KH	39,84	163,78	102	57,08	144,04
3	Angka Kematian Bayi	1.000/ KH	5,49	140,33	9,2	7,42	119,35
Rata-rata Capaian				134,67			121,13

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja tahun 2019 angka kematian ibu adalah 39,84/100.000 KH menjadi 57,08/100.000 Kelahiran Hidup di tahun 2020, sedangkan angka kematian bayi tahun 2019 yaitu 5,49 /1.000 KH sedangkan capaian tahun 2020 sebesar 7,42 / KH, Capaian tahun 2020 ada 7 kasus kematian ibu melahirkan sedang tahun 2019 ada 5 kasus kematian ibu melahirkan sehingga ada peningkatan kasus, sedangkan kematian Bayi ada 91 kasus tahun 2020 dan tahun 2019 ada 69 kasus kematian bayi sehingga ada kenaikan kasus namun masih dibawah target yang ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2020 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.22. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2020	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3		7	8
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,65	77,60	100,00
2	Angka Kematian Ibu	100.000 /KH	57,08	100	142,92
3	Angka Kematian Bayi	1.000/ KH	7,42	9,32	119,35
Rata-rata capaian kinerja			121,13		120,75

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dari 3 indikator yang sudah dapat terealisasi melampaui target adalah : Angka Harapan Hidup 77,65 tahun dan Angka angka kematian ibu 57,08 sedangkan angka kematian bayi 7,42 Jika dibandingkan terhadap capaian kinerja akhir tahun RPJMD (tahun 2021) rata-rata capaian kinerja 120,75 % berada di bawah target, hal menunjukkan kinerja pencapaian sasaran ini sudah cukup berhasil dan dapat dikategorikan sangat baik

Sedangkan realisasi indikator kinerja tahun 2020 yang dapat dibandingkan dengan target nasional, baik Standar Pelayanan Minimal (SPM), dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Target Nasional

No.	Indikator	Satuan	Realisiasi Tahun 2020	Target Nasional(SPM)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH.	57,08	306	Angka Kematian Ibu di bawah target nasional.
2.	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	7,42	24	Angka kematian bayi di bawah target nasioanl.

Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan dengan target nasional baik SPM, maka pencapaian target indikator tahun 2020 untuk kedua indikator tersebut dibawah target nasional, artinya angka kematian ibu dan angka kematian bayi sudah dapat ditekan sehingga sudah lebih baik dari target nasional.

Tabel 2.24. Kinerja Renstra Tahun 2016 – 2021
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

NO	Indikator Kinerja (Renstra)	Target Renstra PD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Angka Harapan Hidup	77,5	77,52	77,54	77,56	77,66	77,6	77,46	72	77,49	77,54	77,65		99,95	92,88	99,94	99,97	99,99	-
	Angka Kematian Ibu Melahirkan	140	130	120	110	102	102	94,80	31,94	31,87	39,84	57,08		132,28	175,43	173,00	163,78	144,00	
	Angka Kematian Bayi	9,8	9,6	9,4	9,2	9,2	9,2	9,00	6,38	5,65	5,49	7,42		108,16	133,54	141,00	140,33	119,35	
	Angka Kematian Balita	11,5	11	10,5	10	9,92	9,92	10,82	8,54	7,41	7,25	8,88		105,91	122,36	129,00	127,50	106,53	
	Angka Kematian Neonatal	8	8	7	7	6	6	4,14	3,99	3,98	2,94	5,13		148,25	150,12	137,00	158,00	114,50	
	Prevalensi Penderita Gizi Buruk	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03		198,00	197,00	196,00	197,00	193,00	
	Prevalensi Penderita Gizi Kurang	<5	<5	<5	<5	<5	<5	4,82	3,82	3,82	4,07	4,07		118,00	123,00	120,00	118,00	149,00	
	Stunting	<28	<27	<26	<25	<25	<25	8,12	8,03	4,27	2,58	3,15		171,00	170,25	183,57	189,68	187,00	
	Desa Siaga Aktif Mandiri	33	33	39	42	48	50	28,74	34	41	44	44		87,09	103,03	105,13	104,76	91,67	-
	Angka Kesakitan DBD	<49	<49	<49	<49	<49	<49	65	13,7	4,1	35,5	20		67,34	172,00	191,00	127,00	159,00	
	Prosentase Desa ODF	20	30	45	75	100	100	44	100	100	100	100		494,90	333,33	222,22	133,33	100,00	-
	Desa/Kalurahan UCI	100	100	100	100	100	100	98,98	100	100	100	100		98,98	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	Prosentase Ketersediaan Obat dan vaksin Puskesmas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	Prosentase Puskesmas Rawat Inap Non Rawat Inap sesuai Standart	30	60	100	100	100	100	60	100	100	100	100		200,00	166,67	100,00	100,00	100,00	-

NO	Indikator Kinerja (Renstra)	Target Renstra PD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standart	30	40	45	50	55	60	75	75	78	78	78		250,00	187,50	173,33	156,00	141,82	-
	Prosentase Tempat Pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat	20	21	22	23	24	25	49	61	64,27	64,27	64,27		245,00	290,48	292,14	279,43	267,79	-
	Cakupan Pendampingan akreditasi faskes primer (25 Faskes)	0	5	5	5	5	5	0	0	12	20	20		-	-	240,00	400,00	400,00	-
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi	-	-	14	21	28		0	-	14	17	17		-	-	100,00	80,95	60,71	
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjut terakreditasi	-	-	40	50	75		0	-	70	80	80		-	-	175,00	160,00	106,67	
	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Terakreditasi	-	-	0	16	16		0	-	-	20	20		-	-	-	125,00	125,00	
	Prosentase Perilaku Sehat (PHBS)	77	77,5	78	79	80	80	75	78	94,5	94,5	94,5		97,40	100,65	121,15	119,62	118,13	-
	Prosentase kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	77	77,5	78	79	80	80	75	78	94,5	94,5	94,5		97,40	100,65	121,15	119,62	118,13	-
	Prosentase Ibu Hamil Kekurangan energi Kronik (KEK)	15	14	13	12	11	10	7,52	7,49	6,04	6,41	6,4		50,13	53,50	46,46	53,42	58,18	-
	Prosentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah	90	90	90	90	90	90	94,32	92,02	93,26	93,26	93,2		104,80	102,24	103,62	103,62	103,56	-

NO	Indikator Kinerja (Renstra)	Target Renstra PD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	35	38	40	45	50	55	39,58	41,01	46,52	46,52	46,52		113,09	107,92	116,30	103,38	93,04	-
	Prosentase bayi baru lahir mendapat IMD	90	90	90	90	90	90	79,79	87,78	89,17	89,17	89,09		88,66	97,53	99,08	99,08	98,99	-
	Prosentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	20	20	20	25	30	30	24,93	71,49	67,1	67,1	67		124,65	357,45	335,50	268,40	223,33	-
	Prosentase Desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	47	50	53	56	59	65	83,83	100	100	100	100		178,36	200,00	188,68	178,57	169,49	-
	Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	73,8	73,9	74	74,1	74,2	74,3	93,3	85	86,5	86,5	86		126,42	115,02	116,89	116,73	115,90	-
	Prosentase penduduk akses air minum	81,7	85	90	95	100	100	94,4	92,99	94,68	94,68	94,78		115,54	109,40	105,20	99,66	94,78	-
	Angka Kesakitan DBD <49/100.000 pddk	<49	<49	<49	<49	<49	<49	65	13,7	0	35,5	20		67,34	172,00	191,00	127,00	159,00	
	Angka keberhasilan Pengobatan TB paru BTA Positif	>85	>85	>85	>85	>85	>85	93	85,2	87,71	92,4	92		109,41	100,24	103,19	108,71	108,24	
	Angka Penemuan pnemonia balita	10	12,5	15	20	25	30	17,31	27,08	27,97	27,97	27,9		173,10	216,64	186,47	139,85	111,60	-
	Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posbindu) PTM, Pemeriksaan Hipertensi, DM	25	30	35	40	45	50	23	32	53	53	53		92,00	106,67	151,43	132,50	117,78	-

NO	Indikator Kinerja (Renstra)	Target Renstra PD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase Pemeriksaan Hipertensi diantara seluruh kasus di fasyankes	-	-	-	<30	<30	<30	-	-	11,22	11,41	46,4		-	-	-	91,96	45,33	
	Prosentase Pemeriksaan DM diantara seluruh kasus di fasyankes		-	-	<50	<50	<50	-	-	14,53	13,57	6,61		-	-	-	136,78	186,78	
	Prosentase Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang memiliki sarana &Prasarana sesuai standar	30	60	100	100	100	100	30	60	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	Persentase kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 100%,	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 50%	50	50	50	50	50	50	50	74,2	100	100	100		100,00	148,40	200,00	200,00	200,00	-
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	80	80	80	80	80	80	80	74,2	49,41	49,41	49		100,00	92,75	61,76	61,76	61,25	-
	Cakupan pemeriksaan Sediaan Makanan dan minuman Siap saji produk restoran aman dikonsumsi oleh masyarakat	540	540	540	540	540	2700	540	860	900	860	850		100,00	159,26	166,67	159,26	157,41	-
	Prosentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Antenatal minimal 4 kali (K4)	90	90	90	90	90	90	93,8	93,34	93,23	93,34	93		104,22	103,71	103,59	103,71	103,33	-

Tabel 2.25. Proporsi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyediaan jasa surat menyurat	22.030.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		10.905.265	13.727.713	13.375.950	13.335.950	8.983.574		49,50	68,64	66,88	66,68	44,92	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	779.800.000	799.800.000	1.445.000.000	474.665.000	421.800.000		635.777.398	727.289.920	1.417.614.894	381.523.745	380.483.479		81,53	90,93	98,10	80,38	90,20	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	319.900.000	350.000.000	400.000.000	403.000.000	499.590.000		310.350.000	341.300.000	384.375.950	376.479.800	499.590.000		97,01	97,51	96,09	93,42	100,00	-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	140.000.000	170.000.000	150.000.000	87.000.000	80.000.000		135.115.000	137.990.000	83.667.000	69.135.000	73.180.000		96,51	81,17	55,78	79,47	91,48	-
	Penyediaan alat tulis kantor	115.000.000	121.000.000	110.000.000	81.110.000	75.000.000		106.825.000	111.837.575	96.429.000	74.766.256	70.915.000		92,89	92,43	87,66	92,18	94,55	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000.000	77.700.000	80.000.000	90.000.000	90.000.000		77.722.500	70.122.000	78.379.650	86.535.613	85.232.300		97,15	90,25	97,97	96,15	94,70	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000		8.795.000	23.890.000	14.450.000	12.089.000	18.040.000		87,95	95,56	96,33	80,59	90,20	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	714.255.000	50.000.000	25.000.000	120.000.000		17.445.000	667.837.630	48.900.000	23.700.000	114.005.000		87,23	93,50	97,80	94,80	95,00	-
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga	203.000.000	277.036.000	516.330.000	439.600.000	624.336.000		172.622.740	32.716.242	446.611.007	367.019.515	395.485.897		85,04	11,81	86,50	83,49	63,35	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.160.000	5.160.000		5.320.000	4.016.000	3.957.200	3.780.400	4.074.800		76,00	57,37	56,53	73,26	78,97	-
	Penyediaan makanan dan minuman	88.000.000	136.300.000	1.005.900.000	124.000.000	124.000.000		71.133.000	106.297.900	903.450.000	122.692.000	119.424.000		80,83	77,99	89,82	98,95	96,31	-
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	114.970.000	114.970.000	110.000.000	119.550.000	100.400.000		106.821.020	114.201.482	109.859.084	95.603.843	61.057.660		92,91	99,33	99,87	79,97	60,81	-
	Pembangunan Gedung Kantor	11.404.475.000	-	-	-	-		11.304.552.000	-	-	-	-		99,12	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mobil Operasional Dinas	-	-	-	245.500.000	1.195.225.000		-	-	-	245.425.000	1.111.665.000					99,97	93,01	-
	Pengadaan Meubelair	29.000.000	186.450.000	50.000.000	207.500.000	32.500.000		29.000.000	181.175.000	49.830.000	199.700.000	31.165.000		100,00	97,17	99,66	96,24	95,89	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.000.000	90.000.000	410.000.000	3.036.160.000	108.235.000		71.210.175	82.854.000	403.374.000	3.004.628.000	104.389.500		92,48	92,06	98,38	98,96	96,45	-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000	2.927.960.000	100.000.000	125.235.000	2.175.000.000		9.995.000	2.858.450.996	94.900.797	122.128.575	2.145.945.300		99,95	97,63	94,90	97,52	98,66	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	208.895.000	243.175.000	330.075.000	374.505.000	702.300.000		170.557.000	205.410.000	197.105.000	340.514.100	5.853.000		81,65	84,47	59,72	90,92	0,83	-
	Pendidikan dan pelatihan formal	300.000.000	400.000.000	562.745.000	430.000.000	8.306.467.505		288.867.000	396.156.500	547.469.600	423.502.900	8.270.766.445		96,29	99,04	97,29	98,49	99,57	-
	Studi Banding	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	-		7.688.900	11.890.900	7.127.000	-	-		64,07	99,09	47,51	-	-	
	Seminar/Lokakarya	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	-		9.785.000	9.676.500	14.910.000	14.791.000	-		97,85	96,77	99,40	98,61	-	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD	39.000.000	113.100.000	55.000.000	19.460.000	10.000.000		25.890.000	97.022.239	42.277.514	14.902.600	8.021.000		66,38	85,78	76,87	76,58	80,21	-
	Penyerapan Aspirasi (Forum PD)	8.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	17.000.000		4.775.000	7.150.000	5.600.000	9.055.000	16.989.600		59,69	79,44	56,00	90,55	99,94	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	13.060.000	21.150.000	20.000.000	19.700.000	10.000.000		12.860.000	14.550.000	16.974.000	16.730.000	8.021.000		98,47	68,79	84,87	84,92	80,21	-
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.089.069.000	4.002.644.000	5.478.858.000	3.214.542.000	3.041.333.000		3.564.275.634	3.490.260.080	4.379.756.195	3.098.748.532	2.785.950.789		87,17	87,20	79,94	96,40	91,60	-
	Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	-	4.940.000		-	-	-	-	4.940.000		-	-	-	-	00,00	-
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya	2.700.000.000	4.700.000.000	14.362.440.000	26.247.607.000	36.225.387.000		2.677.739.414	4.478.997.218	11.962.217.847	20.786.822.222	31.516.044.456		99,18	95,30	83,29	79,20	87,00	-
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	75.000.000	32.887.000	9.630.088.000	11.682.000.000	1.230.133.000		75.000.000	24.912.000	8.196.042.743	7.860.780.574	812.539.840		100,00	75,75	85,11	67,29	66,05	-
	Revitalisasi sistem kesehatan	404.756.000	255.725.000	340.000.000	249.840.000	190.440.000		344.852.609	175.523.797	275.551.004	234.373.088	185.785.000		85,20	68,64	81,04	93,81	97,56	-
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	3.305.050.000	1.231.952.000	300.000.000	406.000.000	284.336.000		2.933.748.000	920.189.946	216.197.200	365.350.800	250.383.900		88,77	74,69	72,07	89,99	88,06	-
	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	25.000.000	46.000.000	50.820.000	36.000.000	18.420.000		24.664.000	41.295.500	17.036.400	13.450.000	15.841.900		98,66	89,77	33,52	37,36	86,00	-
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	125.000.000	240.000.000	100.000.000	252.000.000	115.675.000		95.363.000	220.700.700	53.383.000	222.756.145	108.327.280		76,29	91,96	53,38	88,40	93,65	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyediaan biaya operasional pemeliharaan	8.490.375.000	8.767.789.000	6.050.000.000	846.576.000	-		7.507.134.383	7.779.132.145	5.489.634.697	804.576.000	-		88,42	88,72	90,74	95,04	-	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60.000.000	657.480.000	40.000.000	35.500.000	22.500.000		56.745.400	431.941.000	35.285.000	33.139.500	15.995.000		94,58	65,70	88,21	93,35	71,09	-
	pengelolaan kegawatdaruratan medis bagi Masyarakat	-	-	639.000.000	314.500.000	237.875.000		-	-	298.243.171	245.702.964	191.512.275		-	-	46,67	78,12	80,51	-
	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat	-	-	-	20.000.000	17.920.000		-	-	-	18.211.800	10.952.500		-	-	-	91,06	61,12	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Weru.	3.509.288.000	4.164.047.000	4.608.208.000	-	-		1.669.639.631	1.956.756.728	2.410.368.247	-	-		47,58	46,99	52,31	-	-	
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bulu.	1.621.004.000	2.000.225.000	2.103.053.000	-	-		937.603.878	1.313.834.883	1.492.913.021	-	-		57,84	65,68	70,99	-	-	
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tawang Sari.	3.453.732.000	4.096.423.000	4.099.907.000	-	-		1.709.405.807	2.277.539.433	2.446.896.503	-	-		49,49	55,60	59,68	-	-	
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Nguter	3.445.557.000	4.174.021.000	4.250.460.000	-	-		1.585.615.596	2.323.071.238	2.506.031.256	-	-		46,02	55,66	58,96	-	-	
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sukoharjo	4.421.091.000	4.983.840.000	4.777.082.000	-	-		2.109.898.881	2.954.952.204	3.284.832.677	-	-		47,72	59,29	68,76	-	-	
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bendosari	2.711.304.000	2.874.513.000	2.918.477.000	-	-		1.628.198.264	1.862.214.573	2.139.904.995	-	-		60,05	64,78	73,32	-	-	
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Polokarto	4.146.335.000	5.712.210.000	5.676.790.000	-	-		2.427.368.448	3.245.743.892	3.904.765.450	-	-		58,54	56,82	68,78	-	-	
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Mojolaban	4.749.754.000	5.606.452.000	5.343.708.000	-	-		2.100.319.489	3.126.675.861	3.372.678.940	-	-		44,22	55,77	63,11	-	-	

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Grogol	5.291.955.000	5.788.467.000	5.933.198.000	-	-		2.847.594.119	3.363.712.541	4.009.400.095	-	-		53,81	58,11	67,58	-	-	
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Baki.	3.148.122.000	3.444.022.000	3.414.273.000	-	-		1.580.837.679	2.029.354.605	2.049.055.304	-	-		50,22	58,92	60,01	-	-	
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Gatak.	3.081.611.000	3.287.507.000	3.335.190.000	-	-		1.934.865.633	2.077.394.116	2.437.377.622	-	-		62,79	63,19	73,08	-	-	
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kartasura	4.510.331.000	4.877.560.000	4.778.898.000	-	-		2.169.104.537	2.657.917.600	3.671.700.057	-	-		48,09	54,49	76,83	-	-	
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan & Bahan Berbahaya	150.000.000	322.572.000	100.000.000	34.993.000	284.775.000		129.976.117	297.039.163	93.387.000	34.484.400	250.626.160		86,65	92,08	93,39	98,55	88,01	-
	Perijinan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan Rumah tangga (PKRT)	-	-	34.690.000	48.000.000	14.504.000		-	-	30.860.000	31.070.000	14.391.800		-	-	88,96	64,73	99,23	-
	pengecahan dan pengendalian penyakit tidak menular	-	-	600.000.000	300.000.000	127.185.000		-	-	586.424.800	286.660.311	81.447.800		-	-	97,74	95,55	64,04	-
	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	125.000.000	1.220.770.000	500.000.000	-	-		123.233.060	1.147.600.000	493.750.000	-	-		98,59	94,01	98,75	-	-	
	Pelayanan laboratorium kesehatan daerah	-	-	-	2.206.660.000	1.209.651.000		-	-	-	2.052.129.303	1.140.307.482		-	-	-	93,00	94,27	-
	Fasilitasi Pengembangan Obat dan penelitian teknologi tanaman obat	-	-	200.000.000	-	-		-	-	138.765.560	-	-		-	-	69,38	-	-	
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	235.000.000	211.200.000	125.000.000	107.000.000	104.350.000		227.709.500	208.280.000	125.000.000	98.459.900	73.499.900		96,90	98,62	100,00	92,02	70,44	-
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	225.000.000	638.935.000	850.000.000	646.500.000	989.055.000		225.000.000	624.000.000	836.660.000	625.069.900	978.554.900		100,00	97,66	98,43	96,69	98,94	-
	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	25.000.000	100.000.000	30.000.000	25.175.000	-		24.850.000	100.000.000	30.000.000	25.175.000	-		99,40	100,00	100,00	00,00		

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	50.000.000	184.751.000	160.815.000	70.000.000	70.000.000		48.050.000	172.986.000	157.295.000	68.758.000	67.393.700		96,10	93,63	97,81	98,23	96,28	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000	49.750.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000		10.000.000	45.795.166	37.885.000	20.000.000	17.189.600		100,00	92,05	94,71	100,00	85,95	-
	peningkatan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	-	-	-	287.000.000	116.190.000		-	-	-	272.494.900	113.090.000		-	-	-	94,95	97,33	-
	Peningkatan kesehatan kerja	-	-	70.000.000	17.475.000	21.750.000		-	-	69.150.000	17.445.000	21.599.600		-	-	98,79	99,83	99,31	-
	Peningkatan kesehatan Olah raga	-	-	-	50.000.000	-		-	-	-	39.144.800	-		-	-	-	78,29		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	3.370.000	9.400.000		-	-	-	2.460.000	8.855.000		-	-	-	73,00	94,20	-
	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	10.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	14.001.000		9.750.000	9.945.000	18.750.000	29.883.900	13.999.900		97,50	99,45	93,75	99,61	99,99	-
	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	60.000.000	2.955.472.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.956.800.000		54.554.210	2.955.187.477	2.999.400.000	2.989.698.400	2.955.870.000		90,92	99,99	99,98	99,66	99,97	-
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	120.000.000	135.000.000	67.500.000	73.800.000	23.890.000		112.200.000	129.045.000	65.000.000	73.800.000	23.889.700		93,50	95,59	96,30	100,00	100,00	-
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	120.000.000	4.475.270.000	4.350.000.000	4.350.000.000	4.679.550.000		120.000.000	4.437.208.400	4.345.800.000	4.344.749.700	4.667.731.750		100,00	99,15	99,90	99,88	99,75	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28.000.000	35.000.000	20.000.000	20.950.000	10.000.000		27.532.500	33.882.000	18.934.000	20.788.000	9.999.800		98,33	96,81	94,67	99,23	100,00	-
	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	50.000.000	198.590.000	50.000.000	483.025.000	20.963.000		50.000.000	195.670.400	46.766.000	481.412.700	16.962.700		100,00	98,53	93,53	99,67	80,92	-
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	160.000.000	661.095.000	100.000.000	12.500.000	67.762.000		146.151.253	631.925.000	96.790.000	9.519.800	50.038.000		91,34	95,59	96,79	76,16	73,84	-
	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	20.000.000	127.550.000	100.000.000	192.000.000	60.225.000		18.700.000	121.225.000	80.695.000	161.100.000	25.810.367		93,50	95,04	80,70	83,91	42,86	-
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	30.000.000	116.760.000	50.000.000	20.000.000	10.475.000		29.983.500	94.905.000	39.645.000	19.066.500	9.949.800		99,95	81,28	79,29	95,33	94,99	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	265.000.000	305.000.000	150.000.000	190.100.000	191.440.000		215.030.455	165.049.415	17.541.000	53.711.961	102.078.849		81,14	54,11	11,69	28,25	53,32	-
	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan - bahan Fogging	155.000.000	105.200.000	50.000.000	110.200.000	53.764.000		132.008.020	93.018.000	37.558.000	101.834.000	53.713.800		85,17	88,42	75,12	92,41	99,91	-
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	55.000.000	60.000.000	99.940.000	77.000.000	40.654.000		54.548.500	55.501.000	99.456.500	76.739.900	40.624.000		99,18	92,50	99,52	99,66	99,93	-
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	150.000.000	811.360.000	420.000.000	298.840.000	152.776.000		135.861.400	733.192.600	411.232.868	292.916.800	147.499.200		90,57	90,37	97,91	98,02	96,55	-
	Peningkatan Imunisasi	264.000.000	617.880.000	52.940.000	52.940.000	23.627.000		245.432.750	556.065.677	52.664.000	52.729.800	13.626.800		92,97	90,00	99,48	99,60	57,67	-
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	75.000.000	80.000.000	174.375.000	150.000.000	132.053.000		71.674.000	56.168.000	169.317.348	144.121.500	109.699.650		95,57	70,21	97,10	96,08	83,07	-
	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	50.000.000	315.690.000	75.000.000	50.000.000	13.551.000		46.153.500	288.563.750	68.025.000	48.577.400	7.595.900		92,31	91,41	90,70	97,15	56,05	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	26.000.000	77.615.000	12.090.000	10.000.000	5.050.000		21.910.000	55.557.000	12.090.000	9.994.500	3.455.000		84,27	71,58	100,00	99,95	68,42	-
	Akreditasi Rumah Sakit/Puskesmas	-	-	150.000.000	646.981.000	231.942.000		-	-	137.600.000	580.418.892	164.102.793				91,73	89,71	70,75	-
	Pembangunan Puskesmas	11.614.831.000	4.911.925.000	6.605.645.000	11.264.649.000	4.250.502.000		10.549.928.000	4.872.381.000	6.031.515.000	10.128.411.500	-		90,83	99,19	91,31	89,91	-	
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1.383.950.000	574.800.000	940.011.000	3.903.932.000	1.631.922.000		1.360.043.500	547.163.000	918.243.020	2.196.215.041	1.588.059.230		98,27	95,19	97,68	56,26	97,31	-
	Penyuluhan kesehatan anak balita	56.000.000	364.170.000	85.000.000	50.625.000	2.306.000		56.000.000	363.565.000	82.985.000	49.127.900	2.305.800		100,00	99,83	97,63	97,04	99,99	-
	Pelatihan & pendidikan perawatan anak balita	86.000.000	89.800.000	20.000.000	19.375.000	22.420.000		86.000.000	88.270.000	20.000.000	19.375.000	22.418.700		100,00	98,30	100,00		99,99	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28.000.000	33.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		28.000.000	30.405.000	10.000.000	9.965.000	10.000.000		100,00	92,14	100,00	99,65		-
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan lansia	26.000.000	167.950.000	20.000.000	19.000.000	10.770.000		26.000.000	158.984.000	19.700.000	18.999.800	10.769.700		100,00	94,66	98,50			-
	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	30.000.000	35.000.000	10.000.000	11.220.000	11.220.000		28.674.500	34.840.000	10.000.000	11.219.800	9.919.600		95,58	99,54	100,00			-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.000.000	24.000.000	10.000.000	9.780.000	-		19.750.000	24.000.000	10.000.000	9.720.800	-		98,75	100,00	100,00	99,39		

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan Rumah tangga	-	-	120.000.000	100.000.000	19.170.000		-	-	103.415.000	89.016.000	19.170.000		-	-	86,18	89,02	100,00	-
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant	35.000.000	47.750.000	25.000.000	20.000.000	10.835.000		31.620.000	34.750.500	10.305.000	19.999.700	9.284.000		90,34	72,78	41,22	100,00	85,69	-
	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu dan KB	1.130.950.000	996.922.000	30.000.000	20.000.000	14.840.000		17.040.000	635.598.500	30.000.000	19.534.000	13.890.900		1,51	63,76	100,00	97,67	93,60	-
	Pelatihan dan Pendidikan Kesehatan Ibu dan KB	145.000.000	856.250.000	100.000.000	100.000.000	34.495.000		144.350.000	615.000.000	95.540.000	98.668.300	32.299.100		99,55	71,82	95,54	98,67	93,63	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60.000.000	117.290.000	20.000.000	10.000.000	2.975.000		59.700.000	116.370.000	20.000.000	9.999.600	2.974.800		99,50	99,22	100,00	100,00	99,99	-
	Pelayanan & pendukung pelayanan BLUD	-	-	350.000.000	-	-		-	-	155.575.000	-	-		-	-	44,45	-	-	
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Weru	-	-	-	5.967.468.000	6.147.815.000		-	-	-	3.609.684.972	3.315.279.554		-	-	-	60,49	53,93	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bulu	-	-	-	3.215.509.000	3.260.990.000		-	-	-	1.923.031.344	2.036.017.235		-	-	-	59,80	62,44	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tawang Sari	-	-	-	4.621.918.000	4.981.910.000		-	-	-	3.411.231.064	3.168.447.437		-	-	-	73,81	63,60	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Nguter	-	-	-	4.732.840.000	5.577.087.000		-	-	-	3.172.212.576	3.659.368.594		-	-	-	67,03	65,61	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sukoharjo	-	-	-	6.304.515.000	5.865.688.000		-	-	-	3.329.531.745	3.720.185.002		-	-	-	52,81	63,42	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bendosari	-	-	-	2.899.052.000	3.358.935.000		-	-	-	2.346.745.994	2.708.637.551		-	-	-	80,95	80,64	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Polokarto	-	-	-	6.362.267.000	6.488.111.000		-	-	-	4.664.496.375	4.022.404.136		-	-	-	73,32	62,00	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Mojolaban	-	-	-	6.806.861.000	6.825.301.000		-	-	-	3.816.498.882	4.043.134.149		-	-	-	56,07	59,24	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Grogol	-	-	-	6.439.039.000	6.538.427.000		-	-	-	5.189.677.918	5.214.835.207		-	-	-	80,60	79,76	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Baki	-	-	-	3.949.096.000	4.442.547.000		-	-	-	3.029.693.790	2.790.667.066		-	-	-	76,72	62,82	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gatak	-	-	-	3.374.411.000	3.770.110.000		-	-	-	2.761.014.297	2.581.914.361		-	-	-	81,82	68,48	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kartasura	-	-	-	4.221.668.000	4.460.041.000		-	-	-	3.534.824.452	3.150.211.602		-	-	-	83,73	70,63	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Weru	-	-	-	-	626.253.000		-	-	-	-	212.687.300		-	-	-	-	33,96	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bulu	-	-	-	-	556.651.000		-	-	-	-	231.129.325		-	-	-	-	41,52	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tawang Sari	-	-	-	-	557.230.000		-	-	-	-	333.833.100		-	-	-	-	59,91	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nguter	-	-	-	-	674.251.000		-	-	-	-	261.273.720		-	-	-	-	38,75	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukoharjo	-	-	-	-	835.265.000		-	-	-	-	338.503.019		-	-	-	-	40,53	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendosari	-	-	-	-	678.458.000		-	-	-	-	396.649.200		-	-	-	-	58,46	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Polokarto	-	-	-	-	858.249.000		-	-	-	-	423.097.370		-	-	-	-	49,30	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mojolaban	-	-	-	-	761.775.000		-	-	-	-	320.240.260		-	-	-	-	42,04	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Grogol	-	-	-	-	752.143.000		-	-	-	-	485.763.980		-	-	-	-	64,58	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Baki	-	-	-	-	573.907.000		-	-	-	-	277.792.280		-	-	-	-	48,40	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gatak	-	-	-	-	512.364.000		-	-	-	-	301.643.620		-	-	-	-	58,87	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartasura	-	-	-	-	751.054.000		-	-	-	-	179.701.500		-	-	-	-	23,93	-

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

2.4.1. Tantangan/kendala

1. Kendala Eksternal

- a. Mobilitas penduduk yang tinggi antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo dan antar Kabupaten mempercepat sebaran penyakit menular. Hal ini mengakibatkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular meningkat misalnya HIV/AIDS, Covid-19 dan DBD.
- b. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sukoharjo memiliki pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat misalnya merokok, mengkonsumsi junk food dan mengkonsumsi narkoba, hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan khususnya pada penyakit degeneratif /penyakit tidak menular misalnya Diabetes Miletus (DM), Kardiovaskuler dan kanker (keganasan).
- c. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak pada rendahnya kualitas lingkungan berupa, pembuangan sampah /limbah pabrik pada aliran sungai, penggunaan pestisida yang tidak tepat yang pada akhirnya berdampak pada masalah kesehatan misalnya gangguan kesehatan terutama penyakit yang berbasis lingkungan.
- d. Perubahan iklim yang ekstrem sebagai dampak dari global warming mengakibatkan adanya mutasi virus beberapa penyakit seperti DBD dan siklus hidup vektor yang semakin cepat. Semakin luas daerah endemis DBD dan

- Chikungunya. Pada kejadian banjir yang semakin meluas dapat berdampak pada peningkatan kejadian penyakit diare, Ispa, kulit dan Leptospirosis.
- e. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum optimal.
 - f. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu di daerah perbatasan berpotensi peningkatan penyakit menular.
 - g. Masih ada budaya/mitos/kepercayaan yang menghambat program kesehatan. Misalnya dalam menolak imunisasi, pantang makanan tertentu baik pada ibu hamil maupun saat menyusui, banyak anak banyak rejeki dan masih banyak yang lainnya.
 - h. Networking / jejaring penanganan masalah kesehatan dengan sektor terkait belum optimal. Pembagian tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan upaya kesehatan dan hubungan antara pelayanan kesehatan oleh pemerintah, swasta, dunia usaha dan sektor lain belum optimal. Pemecahan masalah kesehatan belum mengacu pada pendekatan komprehensif lintas program dan lintas sektor, hal ini disebabkan pemahaman belum ada persamaan persepsi.
 - i. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha belum optimal. Kemitraan yang telah dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan

dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk stakeholder belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing - masing dalam pemberdayaan di bidang kesehatan

j. Pemerataan dan keterjangkauan masyarakat terhadap obat publik dan perbekalan kesehatan yang bermutu di unit pelayanan obat dan perbekalan kesehatan pemerintah maupun swasta, belum sesuai dikarenakan sistem yang ada belum tertata secara optimal. Penyusunandan pelaksanaan kerjasama antar lintas program (Badan POM, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota), lintas sektor dan organisasi profesi terkait serta lembaga masyarakat, dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sejak dari produksi, distribusi sampai dengan pemanfaatannya, belum optimal. Disamping itu, masih ditemukan peredaran sediaan farmasi, makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan kesehatan.

k. Mutu, pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional belum tertata secara optimal, baik mutu bahan baku, produksi serta pemanfaatan di sarana pelayanan kesehatan formal.

2. Kendala Internal :

a. Kemampuan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan pembinaan teknis bidang kesehatan kurang sehingga banyak yang tidak menindaklanjuti hasil

- pembinaan misalnya dengan memberikan umpan balik dan solusi pemecahan masalah.
- b. Kurangnya advokasi, sosialisasi, promosi / pemasaran program / kegiatan bidang kesehatan kepada stakeholders.
 - c. Belum optimalnya deteksi dini, surveilans dan penanganan ditingkat pelayanan Primer.
 - d. Tenaga yang kompeten masih kurang dan penempatan tenaga tidak sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan serta kedisiplinan masih rendah.
 - e. Penyelenggaraan manajemen kesehatan di berbagai tingkat administrasi, belum terpadu dan berkesinambungan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta belum semua pelayanan umum bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, adalah:

- 1. Peluang Eksternal
 - a. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan ayat (2), bahwa Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peraturan perundangan tersebut merupakan peluang untuk mengembangkan sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan, Dana Kapitasi dan CSR.

- 2) Perundangan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Bidang Kesehatan yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat (1) e, yang menyebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah terutama pasal 2 ayat (3), bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Kemudian dalam pelaksanaan kedua undang-undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 128 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, ayat (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga, ayat (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
- b. Terdapat dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan. Selanjutnya pada Ayat (4) yang berbunyi bahwa Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan, dan salah satunya (pada point b) adalah kesehatan;

- c. Terdapat komitmen global, regional dan nasional yang menyangkut masalah kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan. Program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), menggantikan program sebelumnya Millennium Development Goals (MDGs) yang selesai pada akhir tahun 2015. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan. Tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) tidak berbeda jauh dari Millennium Development Goals (MDGs) yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat,

mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. Secara umum SDG's memiliki 17 sasaran, di mana sasaran 14 berisikan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya samudera, laut dan kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Goal 14 SDG's bisa menjadi visi kita bersama dalam menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tentunya dengan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan.

- d. Budaya gotong royong masih melekat pada masyarakat Kabupaten Sukoharjo sehingga masalah kesehatan dapat diatasi secara bersama. Budaya harus dipertahankan dalam bentuk program bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
- e. Peluang peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan, seminar, workshop, PKB (Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan).
- f. Jejaring dengan pelayanan swasta pada pelayanan Rujukan
- g. Adanya dukungan finansial dan sumber daya dari lembaga donor baik dalam maupun luar negeri.

2. Peluang Internal

- a. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi (APBD), Pemerintah pusat (Dana Alokasi Khusus) maupun anggaran hibah. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah (APBD).

- b. Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan tenaga melalui cara out sourcing contoh tenaga cleaning service, satpam, tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya.
- c. Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- d. Keberadaan jaringan Puskesmas di setiap desa memberikan kemudahan masyarakat memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mendasarkan pada isu strategis Kabupaten Sukoharjo yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, maka tidak lepas dari peran Dinas Kesehatan untuk mewujudkannya. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dapat terwujud apabila masyarakat Kabupaten Sukoharjo terpenuhi kebutuhan dasar termasuk pelayanan kesehatannya.

Permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan sumber daya kesehatan dan evaluasi kinerja pelayanan umum dan khusus, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya Angka Kesakitan dan Angka Kematian	1	Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, kematian balita dan gizi buruk.	Standar, pelayanan kesehatan remaja belum optimal. Pendidikan kesehatan peduli remaja belum masuk dalam kurikulum pendidikan SLTP dan SLTA, Masih ada kasus gizi buruk termasuk stunting pada bayi dan balita karena pola asuh
		2	Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak Menular	Penemuan dan pengobatan HIV/ AIDS, TB belum optimal, semakin tingginya kasus TB MDR (<i>Multi Drug Resistance</i>) disebabkan

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
				tidak tuntas/ tidak teratur dalam meminum obat TB, gerakan pemberantasan sarang nyamuk kan sebagai pencegahan DBD belum optimal. Masih terdapat penolakan imunisasi, Kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko hipertensi, diabetes mellitus, kanker/ keganasan dan kesehatan jiwa masih kurang
		3	Pelayanan kesehatan dalam penanggulangan bencana/ KLB/ krisis kesehatan belum optimal	Posisi geografis kabupaten sukoharjo daerah rawan bencana; banjir selain itu dengan posisi tersebut Kabupaten Sukoharjo sangat rawan terjadi penularan penyakit seperti dalam kasus pandemi penyakit covid 19
		4	Cakupan UCI yang belum 100%	masih ada penolakan masyarakat terhadap pemberian vaksin di beberapa kelompok tertentu.
2	Akses dan Mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar	5	Masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang belum sesuai standar/ ketentuan	Ketersediaan, pemerataan dan pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten masih kurang, penegakan SOP terhadap pelayanan kesehatan primer maupun rujukan belum optimal, RS dan fasyankes lain, belum semua Puskesmas mempunyai pelayanan gawat darurat pra RS serta perlunya penguatan promotif preventif di RS

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
				Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan pemantapan mutu eksternal
				Belum semua fasyankes melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan
		6	Belum semua masyarakat Kabupaten Sukoharjo ikut jaminan kesehatan.	Keasadaran dari dunia usaha dalam mengikutsertakan karyawannya pada program jaminan kesehatan
		7	Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sukoharjo	Sulitnya mengakses data kunjungan di fasyankes non pemerintah serta masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan penmyakit tidak menular
3	Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sukoharjo	8	PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga	Kurangnya SDMKes untuk mendata sasaran, sasaran pendataan keluarga yang sangat banyak, kebiasaan merokok yang masih tinggi, cakupan rumah tangga sehat masih rendah, penyuluhan tentang PHBS/ program prioritas belum optimal
4	Tata kelola pemerintah yang belum akuntabel	9	Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, <i>unpredictable</i> dan <i>unbounderless</i> menjadi bagian yang harus	Kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang masing kurang Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja kualitas proses evaluasi

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
			diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan.	perencanaan pembangunan sebagai <i>feed back</i> dalam proses pembangunan daerah masih kurang
		10	Belum efektif dan efisien dalam perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan,	Hasil monitoring dan evaluasi program belum dianalisa secara mendalam sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya, Dalam membuat perencanaan program/kegiatan belum melihat indikator kinerja program/ kegiatan
		11	Belum dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan	Hasil monitoring evakuasi di bagian tata kelola kearsipan masih terdapat surat dan dokumen yang hilang, sulitnya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat, penumpukan arsip di sembarang tempat, pengelolaan arsip yang tidak sesuai kaidah-kaidah kearsipan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah

3.2.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo 2021–2026 adalah **“Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”** dengan slogan MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan

Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020. Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

MAJU, Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikir dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN, Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL, Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP, Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo. UNGGUL, Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik. RAPI, Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur ,tertib, beres.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
- 3) Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi.
- 4) Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
- 5) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

3.2.2. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka yang menjadi penekanan adalah misi ke-2 yakni “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas” Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak

pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera. Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

Dari misi kedua yakni “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas” ini Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tujuannya adalah “Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang diukur dengan indikator berupa “Angka Harapan Hidup (AHH)”

3.2.3. Program Prioritas (unggulan) Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo maka dibidang Kesehatan Program unggulanya adalah Penguatan Sistem Kesehatan dan Penanganan Pandemi Covid-19, melalui:

- a. Vaksinasi Covid-19 gratis;
- b. Memperluas deteksi Covid-19 melalui rapid test massal dan pengadaan PCR (Polymerase Chain Reaction) Swab test;
- c. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19;
- d. Memfasilitasi bagi masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan dengan

- penjemputan pasien;
- e. Berobat gratis bagi keluarga miskin melalui Jamkesda, Jampersal dan pengelolaan Premi Asuransi Kesehatan;
 - f. Membudayakan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS);
 - g. Pembangunan Rumah Sakit di Eks - Terminal Kartasura.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Visi Presiden Republik Indonesia dan juga visi Kementerian Kesehatan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” ini sejalan dan searah dengan visi

Bupati Sukoharjo, yaitu “Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”,

Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Misi ini juga selaras dengan misi ke 2 Bupati Sukoharjo, yaitu “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”.

Guna tercapainya indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031 yang kemungkinan akan berdampak ke permasalahan kesehatan , meliputi Arah pengembangan struktur ruang Pengembangan struktur ruang berupa pengembangan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan

fungsional. Struktur ruang dikategorikan berdasar sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan meliputi:

1. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) memiliki cakupan skala layanan tingkat kabupaten atau regional terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan Kartasura dan Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo.
2. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) memiliki cakupan skala layanan tingkat kecamatan atau lintas kecamatan, terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan: Grogol, Mojolaban, Tawang Sari, Gatak, Baki, Polokarto, Bendosari, Nguter, Weru dan Bulu.
3. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) memiliki cakupan skala layanan tingkat kawasan perdesaan, terdiri atas: Palur (Mojolaban), Sragen dan Jati (Gatak), Lengking (Bulu), Kayuapak (Polokarto), Jatingarang (Weru), Kepuh (Nguter), Mojorejo (Bendosari) dan Kedungjambal (Tawang Sari).

Adapun sistem jaringan prasarana yang akan dikembangkan meliputi:

1. Sistem jaringan transportasi, terdiri atas sistem jaringan jalan, sistem jaringan KA dan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
2. Sistem jaringan energi, terdiri atas jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
3. Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas jaringan tetap dan jaringan bergerak.
4. Sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas sumber air, prasarana sumber daya air, jaringan air baku untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
5. Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas: sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan

limbah B3, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem jaringan drainase

Selain hal tersebut diatas adalah kaitan dengan beberapa wilayah Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai kerawanan bencana berupa, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, dan tanah longsor.

Sedangkan integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Rencana Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yaitu pada Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, berkaitan dengan hal tersebut permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;
2. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.

Selanjutnya dari permasalahan tersebut Sasaran yang ditengttukan adalah tercapainya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Kesehatan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, implikasi RTRW dan KLHS Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo maka isu strategis Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Kasus penyakit menular yang diakibatkan virus Covid-19, letak geografis Kabupaten Sukoharjo dan tingginya mobilitas penduduk Sukoharjo serta

- banyaknya kawasan industri di Kabupaten Sukoharjo
2. Masih adanya kasus gizi stunting di Kabupaten Sukoharjo
 3. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 menunjukkan tren fluktuatif dari 9,94 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2016 menjadi 5,49 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 7,49. Adapun penyebab kematian bayi di Kabupaten Sukoharjo yaitu Berat badan lahir renda, kelainan congenital, asfiksia, sepsis kejang, muntaber dan dehidrasi serta faktor lainnya.
 4. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan tren penurunan dari 10,82 pada tahun 2016 menjadi 7,25 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 8,88. Adapun penyebab kematian balitai Kabupaten Sukoharjo terbanya pada kasus komplikasi/penyakit yang diderita balita dan kasus kecelakaan pada balita. Oleh karena itu, perlu edukasi dan pendampingan.
 5. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan fluktuasi, dari tahun 2016-2018 terjadi penurunan dari 94,80 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 31,87 kasus per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018, tapi di tahun 2019 ada kenaikan dibanding tahun 2018 menjadi 39,84 kasus per 1000 Kelahiran Hidup. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 57,08. Adapun penyebab kematian ibu Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh komplikasi/penyakit

yang diderita ibu seperti Hepatomegali, trail dan Emboli air ketuban.

6. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing penduduk.
7. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi, sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes. Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang belum terkelola dengan baik.
8. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni hanya 95,67 persen, dengan akses terhadap air minum dan sanitasi masingmasing sebesar 92,24 persen dan 97,91 persen.
9. Peningkatan Mutu Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Keberhasilan proses pembangunan daerah didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu membangun aparatur yang berkualitas, kompeten dan berkinerja baik menjadi syarat mutlak agar mampu mengimplementasikan semua bentuk cita-cita pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government.)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 adalah:

Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat, dengan indikator tujuan yaitu “Angka Harapan Hidup”

4.1.2. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat, dengan indikator tujuan yaitu “Angka Harapan Hidup maka sasaran untuk

mewujudkan tujuan tersebut adalah

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian dan dengan indicator sasaran :
 - 1) AKI (Angka Kematian Ibu)
 - 2) AKB (Angka Kematian Bayi)
 - 3) AKABA (Angka Kematian Balita)
 - 4) Stunting
 - 5) Prosentase Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
 - 6) Prosentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - 7) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan
2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik dengan indicator sasaran:
 - 8) Nilai SAKIP

Tujuan dan Sasaran serta indikator dan target diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Kondisi Awal	Target Per Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat		Angka Harapan hidup	77,65	77,7	77,75	77,8	77,85	77,9	77,95
	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	AKI (Angka Kematian Ibu)	97,8	97	96	95	94	93	92
		AKB (Angka Kematian Bayi)	7,4	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9
		AKABA (Angka Kematian Balita)	8,88	8,5	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1
		Persentase Stunting	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	7,6%	7,6%	7,5%
		Ketercapaian upaya pencegahan dan	96%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Kondisi Awal	Target Per Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pengendalian Penyakit Menular							
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	59%	62%	64%	66%	69%	72%	75%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	21%	21%	27%	36%	45%	54%	65%
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip	72	72	75	76	77	78	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam periode 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

VISI : “Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

MISI : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran Kab. Sukoharjo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Peningkatan sarana prasarana dan jenis layanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, kapitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan, kepatuhan petugas dalam melaksanakan SOP pelayanan kesehatan, sarana prasarana pelayanan kesehatan dan Penguatan pembiayaan kesehatan.
		Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk, dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan memberdayakan kader kesehatan di desa bersama masyarakat.	Peningkatan Gizi balita dengan menumbuhkan kemandirian masyarakat sadar gizi, Pemantauan pertumbuhan balita baik oleh tenaga kesehatan, kader kesehatan masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di seluruh tatanan institusi melalui advokasi, bina swasana dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran pemerintah, dunia usaha dalam pembangunan kesehatan	Menciptakan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; Peningkatan Desa ODF, STBM, lingkungan sehat, Cakupan pelayanan kesehatan kerja, mutu makanan di kantin sekolah, penjamah makanan & minuman tidak mengandung bahan berbahaya.
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian Penyakit menular dan tidak menular melalui kompetensi tenaga kesehatan, kerjasama lintas program, lintas Sektor dan peran serta masyarakat,	Penurunan angka kesakitan dan kematian Penyakit menular dan tidak menular dengan peningkatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Mewujudkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan melibatkan peran lintas program, lintas sektor dan peran serta masyarakat.
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Melaksanakan manajemen pengelolaan pemerintah dibidang kesehatan yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada visi dan misi Bupati Sukoharjo tahun 2021 – 2026, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya visi dan misi tersebut dari bidang kesehatan, maka program-program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang disusun untuk kurun waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pembinaan Tehnis, Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten / Kota;
- c. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman

- a. Pemberian Izin Apotek Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- i. Peningkatan Pelayanan BLUD

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Dinas Kesehatan																
99	Pendapatan & Pembiayaan			0	0		0		0		0		0			
99.1	Pendapatan & Pembiayaan			0	0		0		0		0		0			
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang meningkat	Angka Harapan Hidup (AHH)	T	77,7	77,5		77,8		77,85		77,9		77,95			
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI).	%	98	96		95		94		93		92			
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	%	7	7		7		7		7		7			
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	%	9	9		8		8		8		8			
		Peresenatase Stunting	%	7,8%	7,8%		7,7%		7,7%		7,6%		7,6%			
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	96	96		96		96		96		96			
		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	59	64		66		69		72		75			
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	21	27		36		45		54		65			
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayan penyakit menular	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi	%	18	22	327.813.164,23	28	369.110.204,31	32	342.949.982,57	40	394.038.587,51	50	317.395.910,68	50	1.751.307.849,2
		Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	%	34	43	327.813.164,23	60	369.110.204,31	78	342.949.982,57	86	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	%	20	40	327.813.164,23	60	369.110.204,31	80	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	%	50	49	327.813.164,23	50	369.110.204,31	52	342.949.982,57	53	394.038.587,51	53	317.395.910,68	53	1.751.307.849,2
		Persentase Capaian UHC	%	81,4	85	327.813.164,23	90	369.110.204,31	95	342.949.982,57	95	394.038.587,51	95	317.395.910,68	95	1.751.307.849,2
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reprduksi	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	%	47	67	327.813.164,23	78	369.110.204,31	89	342.949.982,57	94	394.038.587,51	97	317.395.910,68	97	1.751.307.849,2
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	%	33	58	327.813.164,23	67	369.110.204,31	75	342.949.982,57	92	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	%	83	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
		Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	80	82	327.813.164,23	84	369.110.204,31	85	342.949.982,57	86	394.038.587,51	87	317.395.910,68	87	1.751.307.849,2
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap- tiap 1000 pasien keluar	%	47	45	327.813.164,23	40	369.110.204,31	35	342.949.982,57	20	394.038.587,51	25	317.395.910,68	25	1.751.307.849,2
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100	100	327.813.164,23	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.751.307.849,2
1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase tingkat ketersediaan obat dan bmhp	%	100	100	257.357.113,00	100	299.352.165,00	100	267.505.600,00	100	321.310.850,00	100	242.537.130,00	100	1.388.062.858,0
		Persentase capaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP kewenangan daerah kabupaten kota (RSUD)	%	0	100	257.357.113,00	100	299.352.165,00	100	267.505.600,00	100	321.310.850,00	100	242.537.130,00	100	1.388.062.858,0
1.2.2.2.01.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tersusunnya DED	dok	0	0	0,00	2	150.000,00	0	26.000.000,00	0	80.000.000,00	0	0,00	2	106.150.000,0
		Pembangunan Rumah Sakit Type D di Kecamatan	Paket	0	0	0,00	0	150.000,00	1	26.000.000,00	0	80.000.000,00	0	0,00	1	106.150.000,0
		Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung Rumah sakit Type D di Kecamatan	Paket	0	0	0,00	0	150.000,00	0	26.000.000,00	3	80.000.000,00	0	0,00	3	106.150.000,0
1.2.2.2.01.2	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Gedung Puskesmas terlaksana	puskesmas	0	1	4.000.000,00	1	8.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	5	24.000.000,0
1.2.2.2.01.5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung IGD terpadu yang dibangun	unit	0	0	0,00	1	62.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	62.230.000,0
1.2.2.2.01.7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Produk simplisia/minuman jamu yang dikembangkan produksinya di P4TO	produk	0	0	114.165,00	10	114.165,00	12	125.000,00	12	125.000,00	15	140.000,00	15	618.330,0
1.2.2.2.01.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah ruangan yang direnovasi untuk mencapai standarisasi kelas program JKN	ruang	3	16	1.000.000,00	42	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	4.000.000,0
1.2.2.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan gedung P4TO	Paket	0	0	60.000,00	2	60.000,00	2	70.000,00	2	70.000,00	2	80.000,00	2	340.000,0
1.2.2.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembuatan sarana fasilitas pelayanan kesehatan tradisional	Paket	0	1	790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	790.000,0
1.2.2.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan masjid di lingkungan RSUD Sukoharjo	Paket	0	1	5.198.000,00	0	198.000,00	0	198.000,00	0	198.000,00	0	198.000,00	1	5.990.000,0
		Antropometri Set	Paket	0	12	5.198.000,00	12	198.000,00	12	198.000,00	12	198.000,00	12	198.000,00	12	5.990.000,0
1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat kesehatan /Alat Penunjang Medik di Labkesda	item	0	6	24.312.340,00	6	5.000.000,00	8	14.316.000,00	10	14.031.000,00	10	13.147.500,00	10	70.806.840,0
		Jumlah alat kesehatan /Alat Penunjang Medik yang diadakan di RSUD Sukoharjo	unit	116	9	24.312.340,00	20	5.000.000,00	40	14.316.000,00	45	14.031.000,00	40	13.147.500,00	270	70.806.840,0
1.2.2.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan	unit	0	3	930.000,00	2	260.000,00	2	270.000,00	2	270.000,00	2	280.000,00	11	2.010.000,0
		Alat kesehatan di puskesmas terkalibrasi	unit	0	0	930.000,00	600	260.000,00	600	270.000,00	600	270.000,00	600	280.000,00	600	2.010.000,0
		Kalibrasi alat kesehatan di Gudang Farmasi	item	0	9	930.000,00	23	260.000,00	23	270.000,00	23	270.000,00	23	280.000,00	23	2.010.000,0

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.2.2.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan	item	0	30	3.500.000,00	30	3.600.000,00	30	3.600.000,00	30	3.700.000,00	30	3.700.000,00	150	18.100.000.0
		Review Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 2021 dan Tersusunnya RKO 2022	dok	0	2	3.500.000,00	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00	2	3.700.000,00	2	3.700.000,00	2	18.100.000.0
		Jumlah item Pengadaan obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan	item	0	116	3.500.000,00	130	3.600.000,00	150	3.600.000,00	150	3.700.000,00	150	3.700.000,00	150	18.100.000.0
1.2.2.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan kesehatan	item	0	40	2.500.000,00	40	2.500.000,00	40	2.600.000,00	40	2.600.000,00	40	2.700.000,00	200	12.900.000.0
		Pengadaan BMHP untuk puskesmas	item	0	30	2.500.000,00	30	2.500.000,00	30	2.600.000,00	30	2.600.000,00	30	2.700.000,00	150	12.900.000.0
		Pengadaan BMHP untuk Labkes	item	100	125	2.500.000,00	150	2.500.000,00	175	2.600.000,00	200	2.600.000,00	200	2.700.000,00	0	12.900.000.0
1.2.2.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Panjang kabel listrik yang diganti dari genset ke panel yang sesuai standard untuk menunjang pelayanan kesehatan	m	500	1000	847.670,00	400	200.000,00	450	276.600,00	400	266.850,00	300	236.630,00	3050	1.827.750.0
1.2.2.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik besar yang sesuai standard di RSUD Sukoharjo	unit	0	3	214.000.000,00	3	214.000.000,00	3	216.000.000,00	3	216.000.000,00	3	218.000.000,00	15	1.078.000.000.0
		Kalibrasi alat kesehatan di Gudang Farmasi	item	0	23	214.000.000,00	23	214.000.000,00	23	216.000.000,00	23	216.000.000,00	23	218.000.000,00	23	1.078.000.000.0
		Pemeliharaan dan Kalibrasi alat kesehatan di Labkes	unit	10	12	214.000.000,00	15	214.000.000,00	18	216.000.000,00	21	216.000.000,00	21	218.000.000,00	0	1.078.000.000.0
1.2.2.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya pendistribusian obat, bmhp, vaksin, reagen ke Puskesmas	k	0	144	104.938,00	144	40.000,00	144	50.000,00	144	50.000,00	144	55.000,00	144	299.938.0
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer terakreditasi	%	18	22	68.908.641,23	28	68.511.762,09	32	74.615.892,81	40	71.946.938,96	50	74.078.312,46	50	358.061.547.5
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan terakreditasi	%	34	43	68.908.641,23	60	68.511.762,09	78	74.615.892,81	86	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547.5
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya terakreditasi	%	20	40	68.908.641,23	60	68.511.762,09	80	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547.5
		Persentase Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	%	0	20	68.908.641,23	20	68.511.762,09	30	74.615.892,81	40	71.946.938,96	40	74.078.312,46	40	358.061.547.5
		Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau potensi Bencana	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547.5
		Capaian Universal Health Coverage (UCI Desa/Kelurahan)	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547.5
		Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	%	92	90	68.908.641,23	90	68.511.762,09	90	74.615.892,81	90	71.946.938,96	90	74.078.312,46	90	358.061.547.5
		Persentase Pasien HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan standar	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547.5
		Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547.5
		Desa/Kalurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547.5
		Imunisasi lanjutan anak SD sederajat	%	96	98	68.908.641,23	98	68.511.762,09	98	74.615.892,81	98	71.946.938,96	98	74.078.312,46	98	358.061.547.5
		Imunisasi dasar lengkap	%	96	95	68.908.641,23	95	68.511.762,09	95	74.615.892,81	95	71.946.938,96	95	74.078.312,46	95	358.061.547.5
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547.5
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547.5
		Pelayanan Kesehatan Penderita DM	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547.5

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547,5
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6)	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547,5
		Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547,5
		Persentase kunjungan Bayi baru lahir	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547,5
		Persentase pelayanan anak balita	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547,5
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547,5
		Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk)	%	7	7,5	68.908.641,23	7,3	68.511.762,09	7	74.615.892,81	7	71.946.938,96	7	74.078.312,46	7	358.061.547,5
		Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	%	3,03	14,5	68.908.641,23	13	68.511.762,09	10	74.615.892,81	10	71.946.938,96	10	74.078.312,46	10	358.061.547,5
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans gizi	%	51	90	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547,5
		Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	%	8,1	20	68.908.641,23	30	68.511.762,09	45	74.615.892,81	60	71.946.938,96	60	74.078.312,46	60	358.061.547,5
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 2.2.2.(b)	%	75,3	45	68.908.641,23	50	68.511.762,09	55	74.615.892,81	60	71.946.938,96	60	74.078.312,46	60	358.061.547,5
		Prosentase ketercapaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	%	0	100	68.908.641,23	100	68.511.762,09	100	74.615.892,81	100	71.946.938,96	100	74.078.312,46	100	358.061.547,5
1.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pembahasan Deteksi Penyakit Penyerta pada Ibu Hamil bagi Petugas	O/Th	0	60	87.247,20	65	43.260,00	70	51.912,00	80	62.294,40	90	74.753,28	90	319.466,8
		Removal Program Kesga Gizi	k	0	2	87.247,20	2	43.260,00	1	51.912,00	1	62.294,40	1	74.753,28	7	319.466,8
		Penguatan Pengisian Buku KIA bagi Petugas Kesehatan	O/Th	0	45	87.247,20	50	43.260,00	60	51.912,00	65	62.294,40	65	74.753,28	65	319.466,8
		Orientasi Petugas dalam melaksanakan antenatal care dan post natal care	O/Th	0	45	87.247,20	50	43.260,00	55	51.912,00	60	62.294,40	65	74.753,28	65	319.466,8
		Penguatan MPDN(Maternal Perinatal Death Notification) bagi petugas kesehatan	O/Th	0	45	87.247,20	50	43.260,00	55	51.912,00	60	62.294,40	65	74.753,28	65	319.466,8
		Penyusunan Regulasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	dok	0	1	87.247,20	0	43.260,00	0	51.912,00	0	62.294,40	0	74.753,28	1	319.466,8
		Sosialisasi Perbub Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	orang	0	20	87.247,20	0	43.260,00	0	51.912,00	0	62.294,40	0	74.753,28	20	319.466,8
		Peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan kelas ibu hamil dan ibu balita	orang	0	50	87.247,20	0	43.260,00	0	51.912,00	0	62.294,40	0	74.753,28	50	319.466,8
		Penguatan Rujukan Terpadu Maternal Neonatal bagi Petugas	orang	0	53	87.247,20	0	43.260,00	0	51.912,00	0	62.294,40	0	74.753,28	53	319.466,8
		Orientasi Simatneo ,MPDN dan e-kohort tingkat kabupaten	k	0	1	87.247,20	0	43.260,00	0	51.912,00	0	62.294,40	0	74.753,28	0	319.466,8
		Orientasi Kelas Ibu (Ibu Hamil dan Ibu Balita) bagi tenaga kesehatan di Puskesmas	k	0	1	87.247,20	0	43.260,00	0	51.912,00	0	62.294,40	0	74.753,28	0	319.466,8
		Pembentukan dan Koordinasi Tim AMPSR Kabupaten	k	0	2	87.247,20	0	43.260,00	0	51.912,00	0	62.294,40	0	74.753,28	0	319.466,8
1.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas KIA bagi Puskesmas,TMB,dan klinik	puskesmas	0	12	1.394.482,34	0	1.664.378,80	0	1.997.254,56	0	2.396.705,48	0	2.876.046,57	0	10.328.867,7
		Transport pengiriman sampel	kasus	0	100	1.394.482,34	0	1.664.378,80	0	1.997.254,56	0	2.396.705,48	0	2.876.046,57	0	10.328.867,7
		Peningkatan Kualitas KN/KF bagi Tenaga Kesehatan	orang	0	53	1.394.482,34	55	1.664.378,80	60	1.997.254,56	65	2.396.705,48	65	2.876.046,57	65	10.328.867,7

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Jampersal	kasus	0	78	1.394.482,34	78	1.664.378,80	78	1.997.254,56	78	2.396.705,48	78	2.876.046,57	78	10.328.867.7
		Koordinasi LS/LP dalam rangka AKI/AKB	k	0	1	1.394.482,34	1	1.664.378,80	1	1.997.254,56	1	2.396.705,48	1	2.876.046,57	1	10.328.867.7
		Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tim Kesga Gizi dalam Akselerasi Penurunan AKI/AKB dan Stunting	k	0	1	1.394.482,34	1	1.664.378,80	0	1.997.254,56	0	2.396.705,48	0	2.876.046,57	0	10.328.867.7
1.2.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kajian AMP oleh Tim AMP Kabupaten	k	0	2	52.655,00	2	47.508,00	2	57.009,60	2	68.411,52	2	82.093,82	2	307.677.9
		Pembelajaran Hasil Rekomendasi AMP	k	0	2	52.655,00	2	47.508,00	2	57.009,60	2	68.411,52	2	82.093,82	2	307.677.9
		Peningkatan Kapasitas SDM dalam neonatal esensial	k	0	43	52.655,00	45	47.508,00	50	57.009,60	55	68.411,52	60	82.093,82	60	307.677.9
		Penguatan Pelayanan BBL (Screeing hipotiroid)	k	0	1	52.655,00	1	47.508,00	1	57.009,60	1	68.411,52	1	82.093,82	1	307.677.9
		Pengkajian AMP	k	0	1	52.655,00	0	47.508,00	0	57.009,60	0	68.411,52	0	82.093,82	0	307.677.9
		Orientasi Skring Hipotiroid Sindrom (SHK)	k	0	1	52.655,00	0	47.508,00	0	57.009,60	0	68.411,52	0	82.093,82	0	307.677.9
1.2.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Dokumen Perencanaan	dok	0	1	120.585,00	1	127.544,80	1	130.905,76	1	134.938,91	1	139.778,69	1	653.753.1
		Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor Program Imunisasi balita	k	0	2	120.585,00	2	127.544,80	2	130.905,76	2	134.938,91	2	139.778,69	2	653.753.1
		Monev Program Imunisasi balita	k	0	2	120.585,00	2	127.544,80	2	130.905,76	2	134.938,91	2	139.778,69	2	653.753.1
		Peningkatan Kapasitas Program Imunisasi balita	orang	0	72	120.585,00	72	127.544,80	72	130.905,76	72	134.938,91	72	139.778,69	72	653.753.1
		Bimbingan dan Pembinaan Teknis Program Imunisasi balita	k	0	5	120.585,00	5	127.544,80	5	130.905,76	5	134.938,91	5	139.778,69	5	653.753.1
		Penyediaan Vaksin dan Logistik Program Imunisasi, serta pendistribusian ke Fasyankes	bln	0	12	120.585,00	12	127.544,80	12	130.905,76	12	134.938,91	12	139.778,69	12	653.753.1
		Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-roya	k	0	3	120.585,00	3	127.544,80	3	130.905,76	3	134.938,91	3	139.778,69	3	653.753.1
		Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k	0	1	120.585,00	1	127.544,80	1	130.905,76	1	134.938,91	1	139.778,69	1	653.753.1
		Koordinasi Yankes Anak Balita dalam SDIDTK	k	0	1	120.585,00	1	127.544,80	1	130.905,76	1	134.938,91	1	139.778,69	1	653.753.1
		Penguatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah	k	0	1	120.585,00	1	127.544,80	1	130.905,76	1	134.938,91	1	139.778,69	1	653.753.1
		Monev Pemanfaatan Buku KIA di Puskesmas	puskesmas	0	12	120.585,00	12	127.544,80	12	130.905,76	12	134.938,91	12	139.778,69	12	653.753.1
1.2.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Perencanaan BIAS tingkat Kabupaten	dok	0	1	137.810,00	1	142.382,00	1	147.868,40	1	154.452,08	1	162.352,50	1	744.864.9
		Monitoring dan Evaluasi BIAS	k	0	2	137.810,00	2	142.382,00	2	147.868,40	2	154.452,08	2	162.352,50	2	744.864.9
		Bimbingan dan Pembinaan Teknis BIAS	k	0	2	137.810,00	2	142.382,00	2	147.868,40	2	154.452,08	2	162.352,50	2	744.864.9
		Pelaksanaan BIAS	sekolah	0	560	137.810,00	560	142.382,00	560	147.868,40	560	154.452,08	560	162.352,50	560	744.864.9
		Penyediaan Vaksin dan Logistik Program Imunisasi Anak Sekolah, serta pendistribusian ke Fasyankes	k	0	2	137.810,00	2	142.382,00	2	147.868,40	2	154.452,08	2	162.352,50	2	744.864.9
		Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-roya	k	0	3	137.810,00	3	142.382,00	3	147.868,40	3	154.452,08	3	162.352,50	3	744.864.9
		Penguatan Kabupaten dalam membina posyandu remaja	k	0	1	137.810,00	1	142.382,00	1	147.868,40	1	154.452,08	1	162.352,50	1	744.864.9
		Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k	0	1	137.810,00	1	142.382,00	1	147.868,40	1	154.452,08	1	162.352,50	1	744.864.9
		Koordinasi pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri	k	0	1	137.810,00	0	142.382,00	0	147.868,40	0	154.452,08	0	162.352,50	1	744.864.9
		Koordinasi pelayanan Kesehatn Peduli Remaja	k	0	1	137.810,00	0	142.382,00	0	147.868,40	0	154.452,08	0	162.352,50	0	744.864.9

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.2.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Penguatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Bagi Tenaga Kesehatan	k	0	1	220.468,00	0	642.663,60	0	771.196,32	0	925.435,58	0	1.110.522,70	0	3.670.286,2
		Pertemuan Koordinasi LS/LP dalam Penguatan Implementasi Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil	k	0	1	220.468,00	0	642.663,60	0	771.196,32	0	925.435,58	0	1.110.522,70	0	3.670.286,2
		Pertemuan Koordinasi Provider IVA	k	0	1	220.468,00	0	642.663,60	0	771.196,32	0	925.435,58	0	1.110.522,70	0	3.670.286,2
		Pembinaan Teknis TT WUS	k	0	2	220.468,00	0	642.663,60	0	771.196,32	0	925.435,58	0	1.110.522,70	0	3.670.286,2
		Orientasi Penggunaan panduan Praktis untuk Caregiver/Informal pada perawatan Jangka Panjang bagi Lansia	orang	0	60	220.468,00	0	642.663,60	0	771.196,32	0	925.435,58	0	1.110.522,70	0	3.670.286,2
		Sosialisasi PANDU PTM	puskesmas	0	0	220.468,00	12	642.663,60	12	771.196,32	12	925.435,58	12	1.110.522,70	12	3.670.286,2
		Pelatihan PANDU PTM di Puskesmas	puskesmas	0	0	220.468,00	8	642.663,60	10	771.196,32	12	925.435,58	12	1.110.522,70	70	3.670.286,2
		Integrasi SIMPUS dengan Si PTM dan Pelayanan PANDU PTM	puskesmas	0	0	220.468,00	0	642.663,60	12	771.196,32	12	925.435,58	12	1.110.522,70	12	3.670.286,2
		Pelaksanaan PANDU PTM	puskesmas	0	0	220.468,00	8	642.663,60	10	771.196,32	12	925.435,58	12	1.110.522,70	12	3.670.286,2
		Jumlah Pembentukan Posbindu	pos	0	0	220.468,00	179	642.663,60	191	771.196,32	203	925.435,58	215	1.110.522,70	215	3.670.286,2
		Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posbindu	orang	0	0	220.468,00	373	642.663,60	433	771.196,32	493	925.435,58	553	1.110.522,70	553	3.670.286,2
		BMHP Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	stick	0	0	220.468,00	30000	642.663,60	60000	771.196,32	90000	925.435,58	120000	1.110.522,70	120000	3.670.286,2
		Jumlah Puskesmas melaksanakan Pembelian kit Posbindu	puskesmas	0	0	220.468,00	12	642.663,60	12	771.196,32	12	925.435,58	12	1.110.522,70	12	3.670.286,2
		Jumlah peserta pelatihan Provider IVA	orang	0	0	220.468,00	53	642.663,60	53	771.196,32	65	925.435,58	65	1.110.522,70	65	3.670.286,2
		Bimbingan Teknis Provider IVA oleh dr Spesialis	k	0	1	220.468,00	1	642.663,60	2	771.196,32	2	925.435,58	2	1.110.522,70	2	3.670.286,2
		KIE kepada wanita usia 30-50 tahun beserta pasangannya	k	0	0	220.468,00	36	642.663,60	36	771.196,32	48	925.435,58	48	1.110.522,70	48	3.670.286,2
		Jumlah Puskesmas melaksanakan pengadaan Krio terapi dan pemeliharaannya	puskesmas	0	0	220.468,00	12	642.663,60	12	771.196,32	12	925.435,58	12	1.110.522,70	12	3.670.286,2
		Jumlah terdeteksi Dini Ca Serviks dan Ca Payudara	orang	0	0	220.468,00	153	642.663,60	2064	771.196,32	156	925.435,58	2105	1.110.522,70	2105	3.670.286,2
		Monitoring evaluasi kegiatan IVA	k	0	0	220.468,00	2	642.663,60	2	771.196,32	2	925.435,58	2	1.110.522,70	2	3.670.286,2
		Deteksi dini FR PTM pada usia produktif	orang	0	0	220.468,00	30000	642.663,60	60000	771.196,32	90000	925.435,58	120000	1.110.522,70	120000	3.670.286,2
1.2.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rapat Koordinasi Puskesmas Santun Lansia di DKK	k	0	1	73.142,80	1	49.353,00	1	55.111,80	1	62.022,36	1	70.315,03	1	309.944,9
		Pembinaan Program Lansia di Puskesmas	puskesmas	0	12	73.142,80	12	49.353,00	12	55.111,80	12	62.022,36	12	70.315,03	12	309.944,9
		Refreshing Buku Kesehatan Lansia bagi Kader Lansia	kader	0	96	73.142,80	100	49.353,00	105	55.111,80	110	62.022,36	115	70.315,03	120	309.944,9
		Koordinasi hari ulang tahun lansia tingkat Kabupten	k	0	1	73.142,80	0	49.353,00	0	55.111,80	0	62.022,36	0	70.315,03	1	309.944,9
		Pertemuan Program Kesehatan Lansia	k	0	1	73.142,80	1	49.353,00	1	55.111,80	1	62.022,36	1	70.315,03	1	309.944,9
		Koordinasi dan konsultasi kegiatan program Lansia ke Semarang	k	0	3	73.142,80	3	49.353,00	3	55.111,80	3	62.022,36	3	70.315,03	3	309.944,9
		Refresing dan Evaluasi peran kader kesehatan lansia	k	0	1	73.142,80	0	49.353,00	0	55.111,80	0	62.022,36	0	70.315,03	1	309.944,9
		CERDIK dalam Penanggulangan Hipertensi	k	0	12	73.142,80	12	49.353,00	24	55.111,80	24	62.022,36	24	70.315,03	24	309.944,9
1.2.2.2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0Pengumpulan data Hipertensi dari jejaring	k	0	0	22.560,00	2	27.072,00	2	32.486,40	2	38.983,68	2	46.780,42	2	167.882,4
		Pemanfaatan data Hipertensi dari PISPK/Data lainnya	k	0	0	22.560,00	1	27.072,00	1	32.486,40	1	38.983,68	1	46.780,42	1	167.882,4

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		CERDIK dalam Penanggulangan Hipertensi	k	0	12	22.560,00	12	27.072,00	24	32.486,40	24	38.983,68	24	46.780,42	24	167.882.4
		Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Dengan Jejaring PTM Puskesmas dalam Rangka CERDIK dalam Penanggulangan Hipertensi	k	0	2	22.560,00	12	27.072,00	24	32.486,40	24	38.983,68	24	46.780,42	24	167.882.4
1.2.2.2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengumpulan data DM dari jejaring	k	0	0	19.740,00	1	23.688,00	1	28.425,60	2	34.110,72	2	40.932,86	2	146.897.1
		CERDIK dalam Penanggulangan DM	k	0	0	19.740,00	12	23.688,00	12	28.425,60	12	34.110,72	12	40.932,86	12	146.897.1
1.2.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Rujukan ODGJ	k	0	0	38.242,00	36	57.470,40	48	68.964,48	48	82.757,38	48	99.308,85	48	346.743.1
		Koordinasi Stake Holder terkait penanganan ODGJ	k	0	0	38.242,00	2	57.470,40	2	68.964,48	2	82.757,38	2	99.308,85	2	346.743.1
		KIE terhadap keluarga dan lingkungan terkait penanganan ODGJ	k	0	0	38.242,00	24	57.470,40	24	68.964,48	36	82.757,38	36	99.308,85	36	346.743.1
		Terbentuknya Rumah Singgah untuk pasien ODGJ	rumah	0	0	38.242,00	0	57.470,40	1	68.964,48	1	82.757,38	1	99.308,85	1	346.743.1
		Kunjungan Rumah pada pasien ODGJ	k	0	0	38.242,00	24	57.470,40	24	68.964,48	36	82.757,38	36	99.308,85	36	346.743.1
		Terapi aktifitas Fisik Bagi Penderita ODGJ	puskesmas	0	0	38.242,00	12	57.470,40	12	68.964,48	12	82.757,38	12	99.308,85	12	346.743.1
		Advokasi dan koordinasi ODGJ tingkat Daerah	k	0	0	38.242,00	1	57.470,40	1	68.964,48	2	82.757,38	3	99.308,85	3	346.743.1
		OJT Kesehatan Jiwa	orang	0	1	38.242,00	0	57.470,40	0	68.964,48	0	82.757,38	0	99.308,85	0	346.743.1
1.2.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penguatan investasi kontak TB	kasus	0	400	97.495,00	400	97.495,00	400	97.495,00	400	97.495,00	400	97.495,00	0	487.475.0
		Pengiriman sampel TBC untuk uji silang	k	0	6	97.495,00	6	97.495,00	6	97.495,00	6	97.495,00	6	97.495,00	30	487.475.0
		Penguatan program P2TB	k	0	3	97.495,00	3	97.495,00	3	97.495,00	3	97.495,00	3	97.495,00	15	487.475.0
		Penguatan, pembinaan, supervisi, bintek, monitoring dan evaluasi jejaring fasyankes	Faskes	0	22	97.495,00	22	97.495,00	22	97.495,00	22	97.495,00	22	97.495,00	22	487.475.0
		Penyediaan media KIE program TBC	bh	0	4	97.495,00	4	97.495,00	4	97.495,00	4	97.495,00	4	97.495,00	4	487.475.0
		Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik P2TBC	k	0	10	97.495,00	10	97.495,00	10	97.495,00	10	97.495,00	10	97.495,00	10	487.475.0
		Penguatan diagnosis dan tata laksana TB	Faskes	0	22	97.495,00	22	97.495,00	22	97.495,00	22	97.495,00	22	97.495,00	22	487.475.0
		Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan serta validasi data P2TBC	Faskes	0	22	97.495,00	22	97.495,00	22	97.495,00	22	97.495,00	22	97.495,00	22	487.475.0
1.2.2.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Penemuan kasus HIV ADIS	%	0	45	299.411,00	50	300.831,00	55	300.831,00	60	300.831,00	65	300.831,00	65	1.502.735.0
		Penguatan dan advokasi terhadap lintas sektor terkait	k	0	1	299.411,00	1	300.831,00	1	300.831,00	1	300.831,00	1	300.831,00	1	1.502.735.0
		Penguatan, pembinaan, supervisi, bintek, monitoring dan evaluasi jejaring fasyankes	Faskes	0	18	299.411,00	18	300.831,00	18	300.831,00	18	300.831,00	18	300.831,00	18	1.502.735.0
		Penguatan, advokasi dan pendampingan terhadap KDS ODHA	k	0	2	299.411,00	2	300.831,00	2	300.831,00	2	300.831,00	2	300.831,00	2	1.502.735.0
		Peningkatan kapasitas Tim HIV Puskesmas dan RS untuk kegiatan Orientasi Tes and Treat (OTT)	Faskes	0	14	299.411,00	18	300.831,00	18	300.831,00	18	300.831,00	18	300.831,00	18	1.502.735.0
		Logistik HIV	jns	0	2	299.411,00	2	300.831,00	2	300.831,00	2	300.831,00	2	300.831,00	2	1.502.735.0
		Penyediaan media KIE HIV	bh	0	3	299.411,00	3	300.831,00	3	300.831,00	3	300.831,00	3	300.831,00	3	1.502.735.0
		Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik P2HIV	k	0	10	299.411,00	10	300.831,00	10	300.831,00	10	300.831,00	10	300.831,00	10	1.502.735.0
		Operasional penguatan kegiatan HIV (KPA)	Paket	0	1	299.411,00	1	300.831,00	1	300.831,00	1	300.831,00	1	300.831,00	1	1.502.735.0
		Penguatan program P2HIV	k	0	4	299.411,00	4	300.831,00	4	300.831,00	4	300.831,00	4	300.831,00	20	1.502.735.0

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.2.2.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penanganan dan Penanggulangan COVID-19	keg	1	1	4.175.588,00	1	3.824.588,00	1	3.824.588,00	1	3.824.588,00	1	3.824.588,00	1	19.473.940.0
1.2.2.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Puskesmas respon cepat penanggulangan bencana < 24 jam	puskesmas	0	12	1.127.000,00	12	1.127.000,00	12	1.127.000,00	12	1.127.000,00	12	1.127.000,00	12	5.635.000.0
		Jumlah Kegiatan Pelayanan vaksinasi covid	keg	0	96	1.127.000,00	96	1.127.000,00	96	1.127.000,00	96	1.127.000,00	96	1.127.000,00	576	5.635.000.0
1.2.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pertemuan koordinasi LS/LP dalam	k	0	1	3.314.663,75	0	3.951.100,50	0	4.713.204,60	0	5.614.379,52	0	6.709.955,42	0	24.303.303.7
		Pemantauan tumbuh kembang balita	k	0	1	3.314.663,75	0	3.951.100,50	0	4.713.204,60	0	5.614.379,52	0	6.709.955,42	0	24.303.303.7
		Orientasi pemanfaatan buku KIA/KMS	lbr	0	12140	3.314.663,75	0	3.951.100,50	0	4.713.204,60	0	5.614.379,52	0	6.709.955,42	0	24.303.303.7
		Penyediaan media dalam rangka penurunan stunting	k	1	13	3.314.663,75	0	3.951.100,50	0	4.713.204,60	0	5.614.379,52	0	6.709.955,42	0	24.303.303.7
		Pelaksanaan Rembuk Stunting	k	3	4	3.314.663,75	0	3.951.100,50	0	4.713.204,60	0	5.614.379,52	0	6.709.955,42	0	24.303.303.7
		Koordinasi kegiatan program gizi ke Semarang	anak	0	30	3.314.663,75	0	3.951.100,50	0	4.713.204,60	0	5.614.379,52	0	6.709.955,42	0	24.303.303.7
		Pendampingan balita gizi buruk	sekolah	0	12	3.314.663,75	15	3.951.100,50	17	4.713.204,60	19	5.614.379,52	22	6.709.955,42	22	24.303.303.7
		Pemantauan distribusi tablet tambah darah bagi remaja putri	k	0	1	3.314.663,75	1	3.951.100,50	1	4.713.204,60	1	5.614.379,52	1	6.709.955,42	1	24.303.303.7
		Optimalisasi peran duta anemia terhadap pencegahan Anemia remaja putri di kabupaten sukoharjo	pos	0	1193	3.314.663,75	1195	3.951.100,50	1198	4.713.204,60	1199	5.614.379,52	1200	6.709.955,42	1200	24.303.303.7
		PMT Penyuluhan di Posyandu	anak	0	300	3.314.663,75	350	3.951.100,50	350	4.713.204,60	350	5.614.379,52	350	6.709.955,42	350	24.303.303.7
		PMT Penyuluhan bagi anak difabel di sanggar Inklusi	k	0	1	3.314.663,75	1	3.951.100,50	1	4.713.204,60	1	5.614.379,52	1	6.709.955,42	1	24.303.303.7
		Pertemuan analisis dan mapping permasalahan gizi	puskesmas	0	12	3.314.663,75	12	3.951.100,50	12	4.713.204,60	12	5.614.379,52	12	6.709.955,42	12	24.303.303.7
		Validasi Data Gizi ke Puskesmas	anak	0	240	3.314.663,75	250	3.951.100,50	260	4.713.204,60	270	5.614.379,52	280	6.709.955,42	280	24.303.303.7
		Pelacakan dan Konfirmas masalah Gizi (Surveilans Gizi)	k	0	2	3.314.663,75	2	3.951.100,50	2	4.713.204,60	2	5.614.379,52	2	6.709.955,42	2	24.303.303.7
		Pengumpulan dan Pelaporan Data Gizi Terintegrasi	orang	0	48	3.314.663,75	75	3.951.100,50	90	4.713.204,60	100	5.614.379,52	120	6.709.955,42	0	24.303.303.7
		Peningkatan Kapasitas Petugas dan kader dalam pemberian makan bayi dan anak	k	0	1	3.314.663,75	1	3.951.100,50	1	4.713.204,60	1	5.614.379,52	1	6.709.955,42	1	24.303.303.7
		Konvergensi LS/LP untuk penurunann Stunting melalui pemberian TTD bagi remaja dan Ibu hamil	orang	0	36	3.314.663,75	36	3.951.100,50	48	4.713.204,60	48	5.614.379,52	48	6.709.955,42	48	24.303.303.7
		Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tatalaksana Gizi Buruk	k	0	1	3.314.663,75	1	3.951.100,50	1	4.713.204,60	1	5.614.379,52	1	6.709.955,42	1	24.303.303.7
		Advokasi percepatan penurunan stunting melalui perintisan rumah Gizi	k	0	2	3.314.663,75	2	3.951.100,50	2	4.713.204,60	2	5.614.379,52	2	6.709.955,42	2	24.303.303.7
		Monitoring evaluasi kegiatan program Gizi	puskesmas	0	12	3.314.663,75	12	3.951.100,50	12	4.713.204,60	12	5.614.379,52	12	6.709.955,42	12	24.303.303.7
		Pemantauan pemberian PMT Balita Kurus dan Bumil KEK	k	0	1	3.314.663,75	1	3.951.100,50	1	4.713.204,60	1	5.614.379,52	1	6.709.955,42	1	24.303.303.7
		Pemetaan dan analisis situasi program stunting	orang	0	167	3.314.663,75	55	3.951.100,50	55	4.713.204,60	55	5.614.379,52	55	6.709.955,42	55	24.303.303.7
		Pembinaan KPM	k	0	1	3.314.663,75	1	3.951.100,50	1	4.713.204,60	1	5.614.379,52	1	6.709.955,42	1	24.303.303.7
		Pengukuran dan publikasi stunting	k	0	1	3.314.663,75	1	3.951.100,50	1	4.713.204,60	1	5.614.379,52	1	6.709.955,42	1	24.303.303.7
		Penguatan sistem manajemen data (pencatatan dan pelaporan) dalam rangka penurunan stunting	k	0	1	3.314.663,75	1	3.951.100,50	1	4.713.204,60	1	5.614.379,52	1	6.709.955,42	1	24.303.303.7

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Review kinerja tahunan aksi integrasi stunting	k	0	1	3.314.663,75	1	3.951.100,50	1	4.713.204,60	1	5.614.379,52	1	6.709.955,42	1	24.303.303,7
		Penyediaan PKMK (Pangan olahan keperluan medis khusus) bagi balita dengan masalah gizi	Paket	0	650	3.314.663,75	2700	3.951.100,50	4500	4.713.204,60	4500	5.614.379,52	4500	6.709.955,42	4500	24.303.303,7
1.2.2.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembinaan dan pembentukan Pos UKK/GP2SP/K3 Perkantoran	k	0	5	496.310,00	5	517.400,00	5	570.800,00	5	598.880,00	5	643.776,00	5	2.827.166,0
		Kampanye Aktifitas Fisik Melalui senam Bersama	bln	0	12	496.310,00	12	517.400,00	12	570.800,00	12	598.880,00	12	643.776,00	12	2.827.166,0
		Monev program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	k	0	3	496.310,00	6	517.400,00	6	570.800,00	6	598.880,00	6	643.776,00	6	2.827.166,0
		Advokasi dan Sosialisasi Program Kesehatan Kerja	k	0	13	496.310,00	0	517.400,00	0	570.800,00	0	598.880,00	0	643.776,00	0	2.827.166,0
		Pengukuran Kebugaran Jasmani	k	0	13	496.310,00	0	517.400,00	0	570.800,00	0	598.880,00	0	643.776,00	0	2.827.166,0
1.2.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pembinaan Pengelolaan Sanitasi TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)	k	0	13	1.076.245,00	0	1.094.380,00	0	1.258.000,00	0	1.273.000,00	0	1.292.000,00	0	5.993.625,0
		Pengelolaan Sampah Medis oleh Pihak ke II	bln	0	12	1.076.245,00	0	1.094.380,00	0	1.258.000,00	0	1.273.000,00	0	1.292.000,00	0	5.993.625,0
		Monev Program Kesehatan Lingkungan	k	0	3	1.076.245,00	0	1.094.380,00	0	1.258.000,00	0	1.273.000,00	0	1.292.000,00	0	5.993.625,0
		Pengembangan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	k	0	13	1.076.245,00	14	1.094.380,00	14	1.258.000,00	14	1.273.000,00	14	1.292.000,00	14	5.993.625,0
		Pembinaan Pengelolaan Sanitasi TTU (Tempat-Tempat Umum)	k	0	13	1.076.245,00	4	1.094.380,00	4	1.258.000,00	4	1.273.000,00	4	1.292.000,00	4	5.993.625,0
		Pembinaan Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes	k	0	3	1.076.245,00	1	1.094.380,00	1	1.258.000,00	1	1.273.000,00	1	1.292.000,00	1	5.993.625,0
		Bantuan Sosial Jamban	orang	0	300	1.076.245,00	300	1.094.380,00	300	1.258.000,00	300	1.273.000,00	300	1.292.000,00	300	5.993.625,0
1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Penyediaan Informasi Media KIE	jns	3	3	377.831,00	6	241.131,00	6	4.737.140,00	6	292.140,00	6	292.140,00	6	5.940.382,0
		Penyelenggaraan Gelar Potensi Daerah	k	0	1	377.831,00	1	241.131,00	1	4.737.140,00	1	292.140,00	1	292.140,00	1	5.940.382,0
		Orientasi Program unggulan untuk mengatasi masalah kesehatan	k	0	1	377.831,00	1	241.131,00	1	4.737.140,00	1	292.140,00	1	292.140,00	1	5.940.382,0
		Jumlah video kegiatan promosi kesehatan	judul	0	4	377.831,00	2	241.131,00	2	4.737.140,00	2	292.140,00	2	292.140,00	12	5.940.382,0
1.2.2.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah item BMHP pelayanan kesehatan tradisional	item	0	25	109.784,50	25	110.762,95	25	111.839,25	25	113.023,17	25	114.325,49	125	559.735,3
		Puskesmas melakukan pelayanan kestrad 50%	puskesmas	0	2	109.784,50	2	110.762,95	3	111.839,25	4	113.023,17	5	114.325,49	5	559.735,3
1.2.2.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Perencanaan program Surveilans	dok	0	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	901.976,0
		Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor Program Surveilans/COVID-19	k	0	6	180.395,20	6	180.395,20	6	180.395,20	6	180.395,20	6	180.395,20	6	901.976,0
		Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis program surveilans/COVID-19	keg	0	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	901.976,0
		Penyediaan Logistik Program Surveilans	k	0	6	180.395,20	6	180.395,20	6	180.395,20	6	180.395,20	6	180.395,20	6	901.976,0
		Monitoring dan Evaluasi Program surveilans	k	0	2	180.395,20	2	180.395,20	2	180.395,20	2	180.395,20	2	180.395,20	2	901.976,0
		Penyediaan APD dan Hand Sanitizer	Paket	0	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	901.976,0
		Surveilans Epidemiologi penyakit Potensial KLB/COVID-19	bln	0	12	180.395,20	12	180.395,20	12	180.395,20	12	180.395,20	12	180.395,20	12	901.976,0
		Rujukan, Pengiriman sampel/specimen PD31/keracunan pangan	minggu	0	48	180.395,20	48	180.395,20	48	180.395,20	48	180.395,20	48	180.395,20	48	901.976,0
		Peningkatan Kapasitas tenaga surveilans/pengolah data, Tracer dan tenaga lainnya	orang	0	530	180.395,20	530	180.395,20	530	180.395,20	530	180.395,20	530	180.395,20	0	901.976,0

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Biaya Komunikasi Pelacakan COVID-19	orang	0	5	180.395,20	5	180.395,20	5	180.395,20	5	180.395,20	5	180.395,20	5	901.976,0
		Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k	0	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	180.395,20	1	901.976,0
		Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-roya	k	0	6	180.395,20	6	180.395,20	6	180.395,20	6	180.395,20	6	180.395,20	6	901.976,0
1.2.2.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Forum Komunikasi Lintas Sektor PTM dan Keswa	orang	0	30	32.720,00	0	21.960,00	0	26.352,00	0	31.622,40	0	37.946,88	0	150.601,2
		Deteksi Dini Kesehatan Jiwa	puskesmas	0	0	32.720,00	12	21.960,00	12	26.352,00	12	31.622,40	12	37.946,88	12	150.601,2
		Desa Siaga Sehat Jiwa	ds	0	0	32.720,00	36	21.960,00	48	26.352,00	12	31.622,40	12	37.946,88	0	150.601,2
		Bimtek/Sosialisasi Desa Siaga Sehat Jiwa	ds	0	0	32.720,00	12	21.960,00	12	26.352,00	60	31.622,40	72	37.946,88	72	150.601,2
		Kader terlatih tentang Desa Siaga Sehat Jiwa	orang	0	0	32.720,00	60	21.960,00	120	26.352,00	120	31.622,40	120	37.946,88	120	150.601,2
1.2.2.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pembinaan TPKJM	kec	0	12	20.940,00	12	25.128,00	12	30.153,60	12	36.184,32	12	43.421,18	12	155.827,1
		Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa bagi petugas Puskesmas	puskesmas	0	12	20.940,00	12	25.128,00	12	30.153,60	12	36.184,32	12	43.421,18	12	155.827,1
		Koordinasi Lintas sektor / Program Dengan Kader P2PTM dan Kesehatan Jiwa	k	0	1	20.940,00	0	25.128,00	0	30.153,60	0	36.184,32	0	43.421,18	0	155.827,1
		Bimbingan Teknis Bagi Pengurus Desa Siaga Sehat Jiwa Dalam Rangka Deteksi Dini Kesehatan Jiwa	k	0	1	20.940,00	0	25.128,00	0	30.153,60	0	36.184,32	0	43.421,18	0	155.827,1
1.2.2.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Event/kegiatan yang memerlukan pendampingan tenaga kesehatan	keg	0	50	577.320,00	50	609.632,00	50	667.706,40	50	711.355,68	50	763.734,82	50	3.329.748,8
		Sanggar inklusi melakukan pelayanan kesehatan fisioterapi/rehabilitasi	sanggar	0	12	577.320,00	12	609.632,00	12	667.706,40	12	711.355,68	12	763.734,82	12	3.329.748,8
		Operasional Kader sanggar Inklusi	kader	0	60	577.320,00	60	609.632,00	60	667.706,40	60	711.355,68	60	763.734,82	60	3.329.748,8
		Koordinasi LP/LS Program kesehatan haji	k	0	2	577.320,00	2	609.632,00	2	667.706,40	2	711.355,68	2	763.734,82	10	3.329.748,8
		Pendampingan rujukan	k	0	2	577.320,00	2	609.632,00	2	667.706,40	2	711.355,68	2	763.734,82	2	3.329.748,8
		Sosialisasi persiapan keberangkatan Calon Jemaah haji	k	0	1	577.320,00	1	609.632,00	1	667.706,40	1	711.355,68	1	763.734,82	1	3.329.748,8
		Pendampingan Calon Jemaah haji ke embarkasi/haji dari debarkasi	kel	0	3	577.320,00	3	609.632,00	3	667.706,40	3	711.355,68	3	763.734,82	3	3.329.748,8
		Pengendalian faktor risiko penyakit (K3JH)	k	0	1	577.320,00	1	609.632,00	1	667.706,40	1	711.355,68	1	763.734,82	1	3.329.748,8
		Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan haji	k	0	1	577.320,00	1	609.632,00	1	667.706,40	1	711.355,68	1	763.734,82	1	3.329.748,8
1.2.2.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pemantauan Jentik Berkala (PJB)	ds	0	24	380.402,80	48	462.238,20	48	512.311,20	48	566.269,32	48	624.889,58	48	2.546.111,1
		Penguatan diagnosa dan tatalaksana kasus DBD	k	0	22	380.402,80	22	462.238,20	22	512.311,20	22	566.269,32	22	624.889,58	22	2.546.111,1
		Penguatan kegiatan PSN (larvasida, G1R1 Jumantik, Pengelolaan TTG	ds	0	36	380.402,80	48	462.238,20	48	512.311,20	48	566.269,32	48	624.889,58	48	2.546.111,1
		Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Paket	0	100	380.402,80	100	462.238,20	100	512.311,20	100	566.269,32	100	624.889,58	100	2.546.111,1
		Penyediaan Insektisida dan larvasida	Paket	0	1	380.402,80	1	462.238,20	1	512.311,20	1	566.269,32	1	624.889,58	1	2.546.111,1
		Koordinasi lintas program pengendalian penyakit menular	k	0	2	380.402,80	2	462.238,20	2	512.311,20	2	566.269,32	2	624.889,58	2	2.546.111,1
		Koordinasi lintas sektor pengendalian penyakit menular tingkat kabupaten	k	0	2	380.402,80	2	462.238,20	2	512.311,20	2	566.269,32	2	624.889,58	2	2.546.111,1
		Desa/Kelurahan yang melaksanakan layanan Posbindu PTM	ds	0	0	380.402,80	167	462.238,20	167	512.311,20	167	566.269,32	167	624.889,58	167	2.546.111,1
		Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k	0	1	380.402,80	1	462.238,20	1	512.311,20	1	566.269,32	1	624.889,58	1	2.546.111,1
		Koordinasi LP/LS Program kesehatan haji	k	0	1	380.402,80	1	462.238,20	1	512.311,20	1	566.269,32	1	624.889,58	1	2.546.111,1

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.2.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Logistik program Surveilans dan Imunisasi	Paket	0	11	380.402,80	11	462.238,20	11	512.311,20	11	566.269,32	11	624.889,58	11	2.546.111,1
		Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis program surveilans dan Imunisasi	k	0	2	380.402,80	2	462.238,20	2	512.311,20	2	566.269,32	2	624.889,58	10	2.546.111,1
		Monitoring dan Evaluasi Program surveilans dan Imunisasi	k	0	4	380.402,80	2	462.238,20	2	512.311,20	2	566.269,32	2	624.889,58	2	2.546.111,1
		Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-nya Program Surveilans dan Imunisasi	k	0	2	380.402,80	2	462.238,20	2	512.311,20	2	566.269,32	2	624.889,58	10	2.546.111,1
		Bimtek dan Monev Program P2PTM dan Keswa Ke Puskesmas	OH	0	48	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi Program P2PTM dan Keswa	k	0	5	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Koordinasi Ke Soloraya Program P2PTM dan Keswa	k	0	2	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Pertemuan Koordinasi Program P2PTM/Keswa/Indera	k	0	3	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Penguatan, pembinaan, supervisi, bintek, monitoring dan evaluasi jejaring fasyankes	Faskes	0	22	380.402,80	22	462.238,20	22	512.311,20	22	566.269,32	22	624.889,58	0	2.546.111,1
		Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik P2PM	k	0	10	380.402,80	10	462.238,20	10	512.311,20	10	566.269,32	10	624.889,58	0	2.546.111,1
		Penguatan program P2ISPA	k	0	2	380.402,80	2	462.238,20	2	512.311,20	2	566.269,32	2	624.889,58	0	2.546.111,1
		Cetak Media KIE Program P2PTM & Keswa	lbr	0	6810	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-nya	k	0	2	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Konsultasi & Koordinasi ke provinsi program P2PTM dan Keswa	OH	0	10	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Koordinasi ke Soloraya program P2PTM & Keswa	k	0	2	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Koordinasi/konsultasi/pertemuan/pengambilan logistik program P2PM	k	0	10	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Koordinasi lintas Program dalam rangka Validasi data program P2PTM,Keswa & Indra	k	0	2	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Koordinasi LP/LS Program Surveilans dan Imunisasi	k	0	1	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Pertemuan Desinfo/Sosialisasi LS/Toga/Tomatentang Vaksinasi COVID-19	k	0	2	380.402,80	0	462.238,20	0	512.311,20	0	566.269,32	0	624.889,58	0	2.546.111,1
		Penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang di daftarkan menjadi peserta JKN	OB	0	76500	40.296.380,80	76500	40.296.380,80	76500	40.296.380,80	76500	40.296.380,80	76500	40.296.380,80	76500	201.481.904,0
		Peserta PBP dan BP Kelas III yang mendapat bantuan iuran premi	OB	0	87678	40.296.380,80	87678	40.296.380,80	87678	40.296.380,80	87678	40.296.380,80	87678	40.296.380,80	87678	201.481.904,0
		Pasien yang menerima bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi kasus tertentu	O/Th	0	530	40.296.380,80	530	40.296.380,80	530	40.296.380,80	530	40.296.380,80	530	40.296.380,80	530	201.481.904,0
1.2.2.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Pelatihan Petugas Deteksi Napza Dengan metode ASSIST	puskesmas	0	0	9.450,00	12	11.340,00	12	13.608,00	12	16.329,60	12	19.595,52	12	70.323,1
1.2.2.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Generasi Muda Bebas Napza dengan Skrining menggunakan Methode ASSIST	lok	0	2	9.450,00	4	11.340,00	6	13.608,00	8	16.329,60	10	19.595,52	10	70.323,1
		Monitoring dan evaluasi program Kabupaten/Kota Sehat	k	0	2	432.383,00	12	435.000,00	12	435.000,00	12	435.000,00	12	435.000,00	12	2.172.383,0
		Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina, Tim Teknis dan Forum Kabupaten/Kota Sehat	k	0	3	432.383,00	0	435.000,00	0	435.000,00	0	435.000,00	0	435.000,00	0	2.172.383,0

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Advokasi dan Koordinasi Pokja Desa Sehat	des/kel	0	167	432.383,00	0	435.000,00	0	435.000,00	0	435.000,00	0	435.000,00	0	2.172.383,0
1.2.2.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah item Pengadaan layanan telemedicine	item	0	6	260.000,00	1	260.000,00	1	260.000,00	1	260.000,00	1	260.000,00	10	1.300.000,0
		Jumlah layanan telemedicine DKK	Paket	0	0	260.000,00	10	260.000,00	10	260.000,00	10	260.000,00	10	260.000,00	10	1.300.000,0
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku	%	0	100	6.926.262,84	100	6.926.262,84	100	6.926.262,84	100	6.926.262,84	100	6.926.262,84	100	34.631.314,2
1.2.2.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pemeriksaan klinis	sample	0	2000	2.494.000,00	2200	1.660.000,00	2400	2.624.000,00	2600	2.724.000,00	2800	2.824.000,00	2800	12.326.000,0
		Pemeriksaan Sampel Makanan Minuman	sample	0	1900	2.494.000,00	2100	1.660.000,00	2300	2.624.000,00	2500	2.724.000,00	2700	2.824.000,00	2700	12.326.000,0
		Pemeriksaan Sampel Air	sample	0	2400	2.494.000,00	2600	1.660.000,00	2800	2.624.000,00	3000	2.724.000,00	3200	2.824.000,00	3200	12.326.000,0
		Pemeriksaan Sampel Air Bersih dan Fasilitas Sanitasi Rumah Sakit dan TTU Lainnya	sample	0	2400	2.494.000,00	2600	1.660.000,00	2800	2.624.000,00	3000	2.724.000,00	3200	2.824.000,00	3200	12.326.000,0
		Jumlah SDM pelayanan umum yang disediakan	OB	3	3	2.494.000,00	4	1.660.000,00	4	2.624.000,00	4	2.724.000,00	4	2.824.000,00	4	12.326.000,0
		Jumlah SDM Ahli (Analisis Kesehatan) yang disediakan	orang	2	2	2.494.000,00	2	1.660.000,00	2	2.624.000,00	2	2.724.000,00	2	2.824.000,00	2	12.326.000,0
		Terpenuhinya Biaya Operasional sebagai pendukung kegiatan	keg	100	100	2.494.000,00	110	1.660.000,00	120	2.624.000,00	120	2.724.000,00	120	2.824.000,00	120	12.326.000,0
1.2.2.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Rumah Sakit	7	7	1.775.280,00	8	1.406.820,00	8	1.406.820,00	8	1.406.820,00	8	1.406.820,00	8	7.402.560,0
		Puskesmas terakreditasi	puskesmas	12	12	1.775.280,00	12	1.406.820,00	12	1.406.820,00	12	1.406.820,00	12	1.406.820,00	12	7.402.560,0
		FKTP (Klinik Pratama) terakreditasi	Faskes	0	3	1.775.280,00	6	1.406.820,00	9	1.406.820,00	11	1.406.820,00	14	1.406.820,00	14	7.402.560,0
		FKTU (Klinik Utama) terakreditasi	Klinik Utama	0	0	1.775.280,00	4	1.406.820,00	3	1.406.820,00	3	1.406.820,00	3	1.406.820,00	3	7.402.560,0
		Labkesda terakreditasi	Labkesda	1	1	1.775.280,00	1	1.406.820,00	1	1.406.820,00	1	1.406.820,00	1	1.406.820,00	1	7.402.560,0
		Laboratorium swasta sesuai standar/ memenuhi syarat Faskes	Laboratorium Swasta	0	0	1.775.280,00	1	1.406.820,00	1	1.406.820,00	2	1.406.820,00	2	1.406.820,00	2	7.402.560,0
		Faskes mendapatkan pembinaan dalam rangka akreditasi	Faskes	22	29	1.775.280,00	40	1.406.820,00	45	1.406.820,00	50	1.406.820,00	55	1.406.820,00	55	7.402.560,0
		Penilaian akreditasi rumah sakit Paripurna	%	100	100	1.775.280,00	100	1.406.820,00	100	1.406.820,00	100	1.406.820,00	100	1.406.820,00	100	7.402.560,0
1.2.2.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Penguatan jejaring dengan fasyankes	Faskes	0	20	1.046.870,00	20	846.870,00	20	846.870,00	20	846.870,00	20	846.870,00	20	4.434.350,0
		Penyelidikan Epidemiologi penyakit menular potensial KLB	kasus	0	120	1.046.870,00	120	846.870,00	120	846.870,00	120	846.870,00	120	846.870,00	120	4.434.350,0
		Koordinasi terpadu keluar wilayah untuk kewaspadaan dini dan respon penyakit menular potensial KLB	k	0	10	1.046.870,00	10	846.870,00	10	846.870,00	10	846.870,00	10	846.870,00	10	4.434.350,0
		Penguatan diagnosis dan tatalaksana kasus penyakit potensial KLB	Faskes	0	20	1.046.870,00	20	846.870,00	20	846.870,00	20	846.870,00	20	846.870,00	20	4.434.350,0
		Penguatan pelaporan pengendalian penyakit Hepatitis, Infeksi Saluran Pencernaan (P2HISP)	k	0	1	1.046.870,00	1	846.870,00	1	846.870,00	1	846.870,00	1	846.870,00	1	4.434.350,0
		Penyediaan media KIE KLB	bh	0	3	1.046.870,00	3	846.870,00	3	846.870,00	3	846.870,00	3	846.870,00	3	4.434.350,0
		Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik kasus penyakit menular potensial KLB	k	10	10	1.046.870,00	10	846.870,00	10	846.870,00	10	846.870,00	10	846.870,00	10	4.434.350,0
		Jumlah item Pengadaan Alat pelindung Diri (APD) untuk nakes RSUD Sukoharjo	item	0	9	1.046.870,00	9	846.870,00	9	846.870,00	9	846.870,00	9	846.870,00	54	4.434.350,0
		Penguatan program P2ISPA	k	0	2	1.046.870,00	2	846.870,00	2	846.870,00	2	846.870,00	2	846.870,00	2	4.434.350,0
1.2.2.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya Ambulance	unit	0	0	1.234.976,00	3	1.279.726,00	0	308.000,00	0	308.000,00	0	308.000,00	3	3.438.702,0

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		RS yang terintegrasi dengan sistem aplikasi PSC 119	Rumah Sakit	0	2	1.234.976,00	4	1.279.726,00	6	308.000,00	8	308.000,00	10	308.000,00	0	3.438.702.0
1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase ketercapaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (RSUD)	%	0	100	1.350.000,00	100	1.036.250,00	100	605.000,00	100	538.800,00	100	528.130,00	100	4.058.180.0
		Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	%	100	100	1.350.000,00	100	1.036.250,00	100	605.000,00	100	538.800,00	100	528.130,00	100	4.058.180.0
1.2.2.2.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah item Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Rekam Medis elektronik untuk mendukung pelayanan kesehatan	item	0	7	1.000.000,00	5	836.250,00	3	405.000,00	2	338.800,00	2	328.130,00	19	2.908.180.0
1.2.2.2.03.3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah item Pengadaan Alat /Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet untuk mendukung pelayanan kesehatan	item	0	2	350.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	6	1.150.000.0
1.2.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang diterbtkan ijin	%	96	99	197.410,00	100	210.027,22	100	223.489,76	100	241.998,56	100	252.338,21	100	1.125.263.7
1.2.2.2.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Pendampingan dan verifikasi obyek perijinan	Faskes	42	69	30.000,00	70	30.000,00	74	35.000,00	84	40.000,00	90	40.000,00	90	175.000.0
1.2.2.2.04.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Faskes yang menerapkan SISROUTE	Faskes	12	22	17.800,00	25	20.000,00	28	20.000,00	28	22.000,00	30	22.000,00	30	101.800.0
1.2.2.2.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	FKTP yang memenuhi standar pelayanan 60%	FKTP	0	16	134.210,00	33	139.027,22	33	147.489,76	49	156.998,56	49	167.238,21	49	744.963.7
		Puskesmas dengan kinerja pelayanan 100%	puskesmas	0	7	134.210,00	7	139.027,22	8	147.489,76	10	156.998,56	12	167.238,21	12	744.963.7
		Jumlah Puskesmas yang melakukan survey kepuasan masyarakat	puskesmas	0	12	134.210,00	12	139.027,22	12	147.489,76	12	156.998,56	12	167.238,21	12	744.963.7
		Koordinasi petugas pengelola obat puskesmas	k	3	3	134.210,00	3	139.027,22	3	147.489,76	3	156.998,56	3	167.238,21	3	744.963.7
		Pembinaan dan bimbingan ke sarana pelayanan kefarmasian (Puskesmas. rumah sakit. klinik)	sarana	12	12	134.210,00	15	139.027,22	15	147.489,76	15	156.998,56	15	167.238,21	15	744.963.7
		Konsultasi dan koordinasi tentang Kefarmasian. Alkes dan Perbekes	k	10	10	134.210,00	10	139.027,22	10	147.489,76	10	156.998,56	10	167.238,21	10	744.963.7
1.2.2.2.04.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi standar 80%	Rumah Sakit	0	6	15.400,00	10	21.000,00	10	21.000,00	10	23.000,00	10	23.100,00	10	103.500.0
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	0	100	9.697.894,80	100	9.820.440,00	100	9.576.610,00	100	9.209.530,00	100	8.632.200,00	100	46.936.674.8
		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	%	100	100	9.697.894,80	100	9.820.440,00	100	9.576.610,00	100	9.209.530,00	100	8.632.200,00	100	46.936.674.8
1.2.3.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Sukoharjo	%	25	90	66.500,00	90	70.000,00	90	75.000,00	95	75.000,00	95	75.000,00	95	361.500.0
1.2.3.2.01.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan, Pengawasan, koordinasi dan konsultasi Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	k	0	21	66.500,00	55	70.000,00	60	75.000,00	60	75.000,00	60	75.000,00	60	361.500.0
1.2.3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM sesuai kebutuhan	%	0	95	8.543.660,00	95	8.541.580,00	95	8.172.750,00	95	7.690.670,00	95	6.998.340,00	95	39.947.000.0

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Persentase Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP di wilayah Kabupaten/ Kota (RSUD)	%	0	100	8.543.660,00	100	8.541.580,00	100	8.172.750,00	100	7.690.670,00	100	6.998.340,00	100	39.947.000.0
1.2.3.2.02.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemutakhiran data PPSDMK	dok	0	2	86.390,00	2	115.000,00	2	120.000,00	2	125.000,00	2	130.000,00	2	576.390.0
		Penyusunan perencanaan kebutuhan SDM	dok	1	1	86.390,00	1	115.000,00	1	120.000,00	1	125.000,00	1	130.000,00	1	576.390.0
		Penyusunan Perencanaan kebutuhan perencanaan pendidikan dan pelatihan	k	2	2	86.390,00	15	115.000,00	15	120.000,00	15	125.000,00	15	130.000,00	15	576.390.0
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Koordinasi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	k	0	3	8.457.270,00	3	8.426.580,00	3	8.052.750,00	3	7.565.670,00	3	6.868.340,00	3	39.370.610.0
		Jumlah nakes non ASN penerima Insentif penanganan covid	OB	1380	1350	8.457.270,00	1300	8.426.580,00	1250	8.052.750,00	1200	7.565.670,00	1150	6.868.340,00	7630	39.370.610.0
1.2.3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	%	0	100	1.087.734,80	100	1.208.860,00	100	1.328.860,00	100	1.443.860,00	100	1.558.860,00	100	6.628.174.8
		Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	0	85	1.087.734,80	85	1.208.860,00	90	1.328.860,00	90	1.443.860,00	95	1.558.860,00	95	6.628.174.8
1.2.3.2.03.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti Capacity Building untuk mendukung pelayanan kesehatan	orang	0	360	1.087.734,80	360	1.208.860,00	360	1.328.860,00	360	1.443.860,00	360	1.558.860,00	1800	6.628.174.8
		Capacity Building	orang	0	165	1.087.734,80	170	1.208.860,00	175	1.328.860,00	175	1.443.860,00	175	1.558.860,00	175	6.628.174.8
		Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	kategori	0	9	1.087.734,80	9	1.208.860,00	9	1.328.860,00	9	1.443.860,00	9	1.558.860,00	9	6.628.174.8
		Studi banding	k	0	2	1.087.734,80	2	1.208.860,00	2	1.328.860,00	2	1.443.860,00	2	1.558.860,00	2	6.628.174.8
		Seminar / Lokakarya Bidang Kesehatan	orang	0	30	1.087.734,80	40	1.208.860,00	45	1.328.860,00	50	1.443.860,00	55	1.558.860,00	55	6.628.174.8
		Bimtek kepada pengelola fasilitas kefarmasian	orang	120	0	1.087.734,80	120	1.208.860,00	120	1.328.860,00	120	1.443.860,00	120	1.558.860,00	120	6.628.174.8
		Pelatihan Teknis dan Fungsional Tenaga Kesehatan	orang	0	40	1.087.734,80	50	1.208.860,00	60	1.328.860,00	70	1.443.860,00	80	1.558.860,00	80	6.628.174.8
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	71	76	568.891,00	81	556.833,00	86	556.600,00	91	581.032,00	96	619.238,40	96	2.882.594.4
1.2.4.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT))memiliki izin operasional yang masih aktif.	%	97,48	100	89.726,00	100	59.763,00	100	45.000,00	100	45.000,00	100	52.000,00	100	291.489.0
1.2.4.2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya binwas ke sarana Apotek dan toko obat	sarana	100	100	19.763,00	100	19.763,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	39.526.0
1.2.4.2.01.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pembinaan dan pengawasan ke sarana Apotek dan toko obat	sarana	100	100	39.763,00	100	40.000,00	100	45.000,00	100	45.000,00	100	52.000,00	100	221.763.0
		Pendampingan dan Verifikasi Izin apotek, Toko obat, TKA, Optikal dan UMOT	sarana	90	100	39.763,00	100	40.000,00	100	45.000,00	100	45.000,00	100	52.000,00	100	221.763.0
1.2.4.2.01.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi dan Solo raya	k	0	4	30.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	30.200.0
		Koordinasi program ke puskesmas	puskesmas	0	12	30.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	30.200.0
		Pembahasan hasil visitasi	k	0	8	30.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	30.200.0

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pembinaan pemilik sarana izin apotek, toko obat, alkes, dan UMOT	k	0	1	30.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.200.0
		Sosialisasi peraturan terkait izin apotek, toko obat, toko alkes, optik dan UMOT	k	0	2	30.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	30.200.0
		Visitasi lokasi pemohon Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	sarana	0	36	30.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	30.200.0
1.2.4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase jumlah sarana IRTP berSPPIRT yang dibinwas	%	100	100	80.000,00	100	80.000,00	100	80.000,00	100	85.000,00	100	85.000,00	100	410.000.0
1.2.4.2.03.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan SPPIRT bagi IRTP baru	sarana	50	80	80.000,00	50	80.000,00	50	80.000,00	50	85.000,00	50	85.000,00	50	410.000.0
		Pendampingan dan Verifikasi penerbitan Sertifikat Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Kelas 1 dan PKRT kelas 1	sarana	15	25	80.000,00	25	80.000,00	25	80.000,00	25	85.000,00	25	85.000,00	25	410.000.0
		Pendampingan dan Verifikasi penerbitan sertifikat PIRT	sarana	182	200	80.000,00	200	80.000,00	200	80.000,00	200	85.000,00	200	85.000,00	200	410.000.0
1.2.4.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene	%	95	98	212.895,00	99	222.000,00	100	232.000,00	100	239.000,00	100	255.000,00	100	1.160.895.0
1.2.4.2.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan SPPIRT bagi IRTP baru	sarana	50	80	212.895,00	50	222.000,00	50	232.000,00	50	239.000,00	50	255.000,00	50	1.160.895.0
		Pendampingan dan Verifikasi penerbitan sertifikat Laik Hygiene sanitasi, tempat Pengelolaan Makanan jasa boga, Rumah Makan/restoran dan Dopot Air Minum (DAM)	sarana	20	30	212.895,00	35	222.000,00	35	232.000,00	35	239.000,00	40	255.000,00	40	1.160.895.0
		Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene	%	95	98	212.895,00	99	222.000,00	100	232.000,00	100	239.000,00	100	255.000,00	100	1.160.895.0
		Pertemuan Koordinasi Pengawasan Jasa boga	k	2	2	212.895,00	2	222.000,00	2	232.000,00	2	239.000,00	2	255.000,00	2	1.160.895.0
		Pembinaan dan Pengawasan Jasa boga	lok	1	100	212.895,00	2	222.000,00	2	232.000,00	2	239.000,00	2	255.000,00	2	1.160.895.0
		Fasilitasi Kantin Sekolah Dasar	orang	80	80	212.895,00	80	222.000,00	80	232.000,00	80	239.000,00	80	255.000,00	80	1.160.895.0
		Kursus Higiene Sanitasi Pangan Pada Penjamah Makanan	orang	100	100	212.895,00	100	222.000,00	100	232.000,00	100	239.000,00	100	255.000,00	100	1.160.895.0
		Advokasi dan Sosialisasi Pada Tim Pembina Jasa Boga	k	0	2	212.895,00	0	222.000,00	0	232.000,00	0	239.000,00	0	255.000,00	0	1.160.895.0
1.2.4.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stikerisasi laik sehat pada Pedagang kaki lima	orang	0	200	44.000,00	200	52.800,00	200	63.630,00	200	76.032,00	200	91.238,40	200	327.700.4
1.2.4.2.05.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Puskesmas melaksanakan program stikerisasi Makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	puskesmas	0	5	44.000,00	7	52.800,00	10	63.630,00	12	76.032,00	12	91.238,40	12	327.700.4
1.2.4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase jumlah sarana IRTP berSPPIRT yang dibinwas	%	15	47	142.270,00	62	142.270,00	78	135.970,00	88	136.000,00	100	136.000,00	100	692.510.0

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.2.4.2.06.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pengujian sampel pangan (makanan dan minuman) yang dicurigai mengandung bahan berbahaya	sample	480	900	135.770,00	900	135.770,00	900	135.970,00	900	136.000,00	900	136.000,00	900	679.510.0
		Pengawasan peredaran pangan dan obat di sarana produksi, distributor, outlet, pasar/ swalayan/ minimarket	sarana	28	25	135.770,00	25	135.770,00	25	135.970,00	25	136.000,00	25	136.000,00	25	679.510.0
		Sarana Binwas ke IRTP	sarana	150	150	135.770,00	150	135.770,00	150	135.970,00	150	136.000,00	150	136.000,00	150	679.510.0
		Pengujian sampel pangan IRTP	sample	50	40	135.770,00	40	135.770,00	40	135.970,00	40	136.000,00	40	136.000,00	40	679.510.0
1.2.4.2.06.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Koodinasi dan konsultasi ke Solo Raya dan Provinsi	k	28	28	6.500,00	28	6.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	13.000.0
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	40	46	5.107.334,00	47	5.160.838,00	48	5.735.701,60	49	6.159.405,92	50	6.793.075,50	50	28.956.355.0
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	25	41	341.940,00	50	341.940,00	58	441.940,00	66	349.440,00	75	349.440,00	75	1.824.700.0
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Advokasi Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	k	0	4	341.940,00	4	341.940,00	4	441.940,00	4	349.440,00	4	349.440,00	4	1.824.700.0
		Koordinasi Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten	k	0	4	341.940,00	4	341.940,00	4	441.940,00	4	349.440,00	4	349.440,00	4	1.824.700.0
		Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten	k	1	1	341.940,00	1	341.940,00	1	441.940,00	1	349.440,00	1	349.440,00	1	1.824.700.0
		Penggerakan GERMAS	orang	310	310	341.940,00	310	341.940,00	310	441.940,00	310	349.440,00	310	349.440,00	310	1.824.700.0
		Kampanye Lokal Dalam Mendukung Pelaksanaan GERMAS	orang	850	360	341.940,00	360	341.940,00	360	441.940,00	360	349.440,00	360	349.440,00	360	1.824.700.0
		Lokakarya Forum Kesehatan Desa (FKD)	orang	334	334	341.940,00	334	341.940,00	334	441.940,00	334	349.440,00	334	349.440,00	334	1.824.700.0
		Pemberdayaan Kader Kesehatan	orang	735	735	341.940,00	90	341.940,00	90	441.940,00	90	349.440,00	90	349.440,00	90	1.824.700.0
		Pengiriman peserta Pertiuhada Tingkat Provinsi	Paket	0	0	341.940,00	0	341.940,00	1	441.940,00	0	349.440,00	0	349.440,00	1	1.824.700.0
		KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat	orang	400	450	341.940,00	450	341.940,00	450	441.940,00	450	349.440,00	450	349.440,00	450	1.824.700.0
		Penyebarluasan Informasi Kesehatan	M	2	2	341.940,00	2	341.940,00	2	441.940,00	2	349.440,00	2	349.440,00	2	1.824.700.0
1.2.5.2.02	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	%	90	90	109.709,00	90	111.000,00	90	121.000,00	90	123.000,00	90	123.000,00	90	587.709.0
1.2.5.2.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyuluhan Kelompok	orang	200	200	109.709,00	200	111.000,00	200	121.000,00	200	123.000,00	200	123.000,00	200	587.709.0
		Orientasi kader Dasiat / kader Posyandu dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang program unggulan	orang	130	130	109.709,00	130	111.000,00	130	121.000,00	130	123.000,00	130	123.000,00	130	587.709.0
		Penyediaan Media sosial dalam rangka pelaksanaan GERMAS	orang	0	60	109.709,00	60	111.000,00	60	121.000,00	60	123.000,00	60	123.000,00	0	587.709.0
1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %	%	67	75	4.655.685,00	83	4.707.898,00	92	5.172.761,60	100	5.686.965,92	100	6.320.635,50	100	26.543.946.0
		Persentase Posyandu Aktif Mandiri	%	52	53	4.655.685,00	54	4.707.898,00	58	5.172.761,60	59	5.686.965,92	60	6.320.635,50	60	26.543.946.0
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Evaluasi Pelaksana Terbaik Desa Siaga Ber - PHBS	kec	12	12	4.655.685,00	12	4.707.898,00	12	5.172.761,60	12	5.686.965,92	12	6.320.635,50	12	26.543.946.0
		Konsultasi dan koordinasi program promkes dan pemberdayaan masyarakat	k	4	6	4.655.685,00	6	4.707.898,00	6	5.172.761,60	6	5.686.965,92	6	6.320.635,50	6	26.543.946.0
		Bimtek UKBM	lap	12	12	4.655.685,00	12	4.707.898,00	12	5.172.761,60	12	5.686.965,92	12	6.320.635,50	12	26.543.946.0
		Pembinaan Masyarakat dalam rangka Evaluasi Program Kesehatan	lok	2	2	4.655.685,00	2	4.707.898,00	2	5.172.761,60	2	5.686.965,92	2	6.320.635,50	2	26.543.946.0

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Operasional Kader Posyandu	kader	7432	7575	4.655.685,00	7580	4.707.898,00	7581	5.172.761,60	7585	5.686.965,92	7590	6.320.635,50	7590	26.543.946.0
		Pemantauan Operasional Posyandu	k	1	1	4.655.685,00	1	4.707.898,00	1	5.172.761,60	1	5.686.965,92	1	6.320.635,50	1	26.543.946.0
		Penggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	orang	40	40	4.655.685,00	40	4.707.898,00	40	5.172.761,60	40	5.686.965,92	40	6.320.635,50	40	26.543.946.0
1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	74	75		76		77		78		79			
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	308.274.855,81	100	316.901.422,81	100	324.632.090,81	100	332.009.849,81	100	338.483.884,81	100	1.620.302.104.0
		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	%	0	100	308.274.855,81	100	316.901.422,81	100	324.632.090,81	100	332.009.849,81	100	338.483.884,81	100	1.620.302.104.0
0.0.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	159.934.110,05	100	165.073.944,05	100	170.727.762,05	100	176.946.961,05	100	183.788.080,05	100	856.470.857.2
0.0.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang	1337	1410	158.874.190,05	1452	164.014.024,05	1498	169.667.842,05	1549	175.887.041,05	1605	182.728.160,05	3314	851.171.257.2
0.0.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPj yang telah diverifikasi dan disahkan	dok	4500	5000	1.059.920,00	5000	1.059.920,00	5000	1.059.920,00	5500	1.059.920,00	5500	1.059.920,00	5500	5.299.600.0
0.0.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	2.443.535,00	100	2.490.265,00	100	2.554.865,00	100	2.618.425,00	100	2.186.341,00	100	12.293.431.0
0.0.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	stel	4140	4170	1.421.485,00	4210	1.446.485,00	4240	1.471.485,00	4260	1.491.485,00	4290	1.511.485,00	9054	7.342.425.0
0.0.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 jpl per tahun per orang	orang	180	190	760.000,00	200	796.000,00	210	835.600,00	220	879.160,00	230	427.076,00	1230	3.697.836.0
		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pegawai	0	40	760.000,00	40	796.000,00	40	835.600,00	40	879.160,00	40	427.076,00	40	3.697.836.0
0.0.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarpras Disiplin pegawai yang diadakan	unit	0	650	22.940,00	400	13.920,00	400	13.920,00	400	13.920,00	400	13.920,00	400	78.620.0
0.0.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun	lap	1	1	82.060,00	1	76.810,00	1	76.810,00	1	76.810,00	1	76.810,00	1	389.300.0
0.0.1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memanfaatkan Sistem Informasi Kepegawaian	pegawai	100	100	5.400,00	100	5.400,00	100	5.400,00	100	5.400,00	100	5.400,00	100	27.000.0
0.0.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	dok	1	1	148.050,00	1	148.050,00	1	148.050,00	1	148.050,00	1	148.050,00	1	740.250.0
0.0.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	pegawai	40	40	3.600,00	40	3.600,00	40	3.600,00	40	3.600,00	40	3.600,00	40	18.000.0
0.0.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.225.250,00	100	1.865.250,00	100	852.500,00	100	972.500,00	100	12.500,00	100	4.928.000.0
0.0.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit	0	2	560.000,00	3	840.000,00	3	840.000,00	2	560.000,00	0	0,00	13	2.800.000.0
0.0.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	3	1	652.750,00	2	912.750,00	0	0,00	1	300.000,00	0	0,00	2	1.865.500.0
0.0.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	2	2	12.500,00	2	12.500,00	2	12.500,00	2	12.500,00	2	12.500,00	2	62.500.0
0.0.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	0	0	0,00	25	100.000,00	0	0,00	25	100.000,00	0	0,00	0	200.000.0
0.0.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian pelayanan BLUD	%	100	100	142.280.354,44	100	144.280.354,44	100	146.280.354,44	100	148.280.354,44	100	149.280.354,44	100	730.401.772.2
0.0.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang medik dan non medik serta pelayanan administrasi pendukung pelayanan kesehatan	%	98	100	142.280.354,44	100	144.280.354,44	100	146.280.354,44	100	148.280.354,44	100	149.280.354,44	100	730.401.772.2

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
0.0.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	57.092,00	100	57.092,00	100	57.092,00	100	57.092,00	100	57.092,00	100	285.460.0
0.0.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	2	2	17.092,00	2	17.092,00	2	17.092,00	2	17.092,00	2	17.092,00	2	85.460.0
0.0.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dok	1	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	25.000.0
0.0.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dok	1	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	25.000.0
0.0.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	dok	1	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	25.000.0
0.0.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dok	1	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	25.000.0
0.0.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dok	4	4	20.000,00	4	20.000,00	4	20.000,00	4	20.000,00	4	20.000,00	4	100.000.0
0.0.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	116.417,69	100	116.417,69	100	116.417,69	100	116.417,69	100	116.417,69	100	582.088.4
0.0.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	dok	1	1	17,69	1	17,69	1	17,69	1	17,69	1	17,69	1	88.4
0.0.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	lap	1	1	116.400,00	1	116.400,00	1	116.400,00	1	116.400,00	1	116.400,00	1	582.000.0
0.0.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	579.650,25	100	579.650,25	100	579.650,25	100	579.650,25	100	579.650,25	100	2.898.251.2
0.0.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	bh	15	15	19.378,75	15	19.378,75	15	19.378,75	15	19.378,75	15	19.378,75	15	96.893.7
0.0.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	bh	27	27	59.000,00	27	59.000,00	27	59.000,00	27	59.000,00	27	59.000,00	27	295.000.0
0.0.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	bh	18	18	101.009,50	18	101.009,50	18	101.009,50	18	101.009,50	18	101.009,50	18	505.047.5
0.0.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	jns	4	4	193.025,00	4	193.025,00	4	193.025,00	4	193.025,00	4	193.025,00	4	965.125.0
0.0.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	jns	32	32	86.500,00	32	86.500,00	32	86.500,00	32	86.500,00	32	86.500,00	32	432.500.0
0.0.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	bh	3	3	4.872,00	3	4.872,00	3	4.872,00	3	4.872,00	3	4.872,00	3	24.360.0
0.0.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	orang	400	400	9.900,00	400	9.900,00	400	9.900,00	400	9.900,00	400	9.900,00	400	49.500.0
0.0.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	k	45	45	105.965,00	45	105.965,00	45	105.965,00	45	105.965,00	45	105.965,00	45	529.825.0
0.0.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1.167.849,38	100	1.167.849,38	100	1.167.849,38	100	1.167.849,38	100	1.167.849,38	100	5.839.246.9
0.0.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar	surat	22720	22720	17.220,00	22720	17.220,00	22720	17.220,00	22720	17.220,00	22720	17.220,00	22720	86.100.0
0.0.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	rekening	12	12	482.442,00	12	482.442,00	12	482.442,00	12	482.442,00	12	482.442,00	12	2.412.210.0
0.0.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	orang	37	37	668.187,38	37	668.187,38	37	668.187,38	37	668.187,38	37	668.187,38	37	3.340.936.9
0.0.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	470.597,00	100	1.270.600,00	100	2.295.600,00	100	1.270.600,00	100	1.295.600,00	100	6.602.997.0
0.0.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi	unit	2	2	71.450,00	2	71.450,00	2	71.450,00	2	71.450,00	2	71.450,00	2	357.250.0
0.0.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara/difasilitasi	unit	15	15	86.950,00	15	86.950,00	15	86.950,00	15	86.950,00	15	86.950,00	15	434.750.0

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
0.0.1.2.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara/difasilitasi	unit	3	3	60.150,00	3	60.150,00	3	60.150,00	3	60.150,00	3	60.150,00	3	300.750.0
0.0.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	unit	0	0	0,00	0	0,00	10	25.000,00	0	0,00	10	25.000,00	0	50.000.0
0.0.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	45	45	32.050,00	45	32.050,00	45	32.050,00	45	32.050,00	45	32.050,00	45	160.250.0
0.0.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	11	1	199.997,00	14	1.000.000,00	14	2.000.000,00	14	1.000.000,00	14	1.000.000,00	14	5.199.997.0
0.0.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	32	32	20.000,00	32	20.000,00	32	20.000,00	32	20.000,00	32	20.000,00	32	100.000.0

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran dan biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja harus memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/ atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Dinas Kesehatan, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 - 2026

Indikator Tujuan / Sasaran PD	Kondisi Awal	Target Per Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AKI (Angka Kematian Ibu)	97,8	97	96	95	94	93	92
AKB (Angka Kematian Bayi)	7,4	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9
AKABA (Angka Kematian Balita)	8,88	8,5	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1
Stunting	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%	7,6%	7,6%	7,5%
Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	96%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	59%	62%	64%	66%	69%	72%	75%
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	21%	21%	27%	36%	45%	54%	65%
Nilai Sakip	72	72	75	76	77	78	80

Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana terlampir sebagai berikut :

Tabel 7.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1 Persentase Puskesmas dengan peningkatan program penyakit menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4 Persentase FKTP terakreditasi	0,18	0,18	0,216	0,277	0,318	0,397	0,5	0,5
		5 Persentase FKTL terakreditasi	34%	34	43	60	78	86	100	100
		6 Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	20	20	0,4	0,6	0,8	1	1	1
		7 Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	0,5	49	49	50	52	53	53	53
		8 Persentase Capaian UHC	81,4	81,4	85	90	95	95	95	95
		9 Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan IBU		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		10 Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		11 Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		12 Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		13 persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		14 Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reprduksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		15 Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		16 Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	47%	58%	67%	78%	89%	94%	97%	97%
		17 Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	33%	42%	58%	67%	75%	92%	100%	100%
		18 Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	83%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	19 Persentase Pemanfaatn Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	20 persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	71%	71%	76%	81%	86%	91%	96%	96%
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	21 Persentase Desa siaga mandiri aktif	40	45	46	47	48	49	50	50
V	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	22 Prosentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan untuk lima tahun mendatang sampai tahun 2026. Renstra juga disusun tidak saja sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan selama lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, baik citra aparatur, masyarakat dan lingkungan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, sehingga visi dan misi yang tersusun memang layak dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Agenda-agenda strategis pembangunan kesehatan harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam visi dan misi unit kerjanya, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan secara bersama-sama.

Pelibatan seluruh unsur jajaran kesehatan di Kabupaten Sukoharjo dalam karya nyata dalam rangka menjabarkan visi dan misi merupakan modal yang paling penting, sehingga bukan hanya memiliki visi dan misi yang paling utama tetapi bagaimana visi dan misi itu dituangkan dalam karya yang nyata dalam membangun Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu perlu penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo demi mewujudkan RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5(lima) tahun kedepan. Oleh karena itu ,

konsistensi, kerjasama, transparansi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukanguna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI *a*

PARAF KOTRUMASI	
Ka. SARPELEMAN	<i>a</i>
Kabag. Hukum	<i>P.</i>



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo Telp. (0271) 593015 Fax. (0271) 592251
website: dkk.sukoharjokab.go.id, email: dkk@sukoharjokab.go.id